

MISKAWI
KELAM DI PADANG BULAN

(Dinamika Kehidupan PSK Lokalisasi)

Fitri, 27 tahun: "Saya menjadi seperti ini (menjadi PSK) semata-mata karena cari uang Mas, sulit cari kerja karena mungkin tingkat pendidikan saya cuma lulus sekolah dasar (SD), sementara keluarga saya sangat miskin dan adik-adik saya empat masih kecil-kecil, apalagi yang bisa saya banggakan sebab pacar saya meninggalkan saya setelah merenggut kegadisan saya. Saya malu jika diam di rumah tanpa aktivitas maka lebih baik begini ini (menjadi PSK). Keluarga saya tidak tahu jika saya seperti ini, jika tahu saya kira akan dilarang."

Tia, 27 tahun : "Mas, coba pikir! Apakah orang-orang yang mencela kami (para pelacur) itu benar-benar orang bersih, orang suci? Apakah mereka tidak pernah berbuat dosa sedikitpun sehingga mencela kami, menghina kami? Saya yakin orang-orang yang mencela saya juga pernah berbuat dosa, hanya saja mereka pintar menutupi. Lalu apakah kami tidak pernah berbuat baik? Kami juga sering berbuat baik, Mas. Saya juga sering amal, untuk pembangunan masjid, pada orang yang lebih miskin dari saya. Saya juga ikut pengajian satu Minggu satu kali. Saya merasa lebih baik daripada seorang pejabat yang korupsi, dari seorang kiai haji yang melakukan pelecehan seksual pada santrinya"



Komunitas Pecinta Sejarah Blambangan

KOSEBA



MISKAWI

**KELAM
DI
PADANG BULAN**

(Dinamika Kehidupan PSK Lokalisasi)



KOSEBA - AL FASTABIQ AL KHAIRAT

KELAM di PADANG BULAN

(Dinamika Kehidupan PSK Lokalisasi)

KELAM di PADANG BULAN

(Dinamika Kehidupan PSK Lokalisasi)

MISKAWI

CV. Al Fastabiq Al Khairat
Komunitas Pecinta Sejarah Blambangan

KELAM di PADANG BULAN
Dinamika Kehidupan PSK Lokalisasi

Penulis:
Miskawi

Editor
Ika Ningtyas

Desain Sampul dan Tata Letak:
Taufik RB

Cetakan Pertama, November 2013

Hak Cipta @Fastabiq

xv + 126 hlm, 12 x 19 cm

ISBN 978-602-14635-0-5

CV. Al Fastabiq Al Khairat

Komunitas Pecinta Sejarah Blambangan (Koseba)

Jl. Basuki Rahmat 147 RT 02 RW 03

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Email: fastabiq_e@yahoo.com

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Masalah.....1
- 1.2 Ruang Lingkup dan Permasalahan.....9

BAB II Tinjauan Pustaka

- 2.1 Marginalisasi Perempuan dan Pelacuran.....12
- 2.2 Sejarah Berdirinya Pelacuran.....20
- 2.3 Eksistensi PSK dan Dampaknya.....31
- 2.4 Peran Perempuan dalam Bidang Ekonomi bagi
Kehidupan Keluarga.....35
- 2.5 Struktur dan Pola Lokalisasi.....37
- 2.6 Pandangan Masyarakat terhadap Keberadaan
PSK.....40

BAB III Metode Penelitian.....42

BAB IV Pembahasan.....50

- 4.1 Sejarah Lokalisasi Padang Bulan.....63

4.2 Stigma Negatif Masyarakat terhadap Keberadaan PSK Padang Bulan.....	81
4.3 Faktor Pendorong Perempuan menjadi PSK....	90
4.4 Peran PSK di Bidang Ekonomi bagi Keluarganya.....	100
4.5 Persepsi Masyarakat terhadap PSK di Lokalisasi Padang Bulan.....	107
4.6 Bentuk Pembelaan PSK terhadap Penilaian Masyarakat.....	114
BAB V Penutup.....	119
Daftar Pustaka.....	123
Biografi.....	127

Pengantar Penerbit

Prostitusi sesungguhnya adalah permasalahan sosial yang paling tua di dunia ini. Prostitusi ibarat dua sisi mata uang: dibutuhkan namun juga ditentang. Seberapapun keras pertentangan itu, kenyataannya prostitusi tetap tumbuh subur di seluruh penjuru bumi.

Buku *Kelam di Padang Bulan* karya Miskawi ini lahir bukan bermaksud menyetujui maupun menolak kehadiran prostitusi (yang juga tumbuh subur di Banyuwangi). Sebaliknya, buku ini menghadirkan fakta sosial bahwa keberadaan prostitusi lokalisasi bukan sekedar urusan dosa atau tidak dosa. Permasalahan sebenarnya lebih kompleks.

Buku ini lebih banyak mengupas pengakuan pekerja seks komersial (PSK) menerjunkan dirinya ke dunia hitam Lokalisasi Padang Bulan, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh. Ini adalah lokalisasi terbesar di Banyuwangi bahkan disebut-sebut nomor dua di Jawa Timur setelah Lokalisasi Dolly Surabaya. Meski penelitian dilakukan 2009 lalu, namun isinya masih relevan hingga saat ini. Terlebih lagi Pemerintah Banyuwangi berencana menutup lokalisasi ini pada 2014 mendatang.

PSK telah terstigma sebagai pelaku tunggal dalam dunia prostitusi. Kenyataannya, dalam industri seks modern sekarang, PSK ibaratnya hanya mesin produksi pencetak uang. Padahal banyak pihak yang bermain dalam bisnis hitam itu mulai lelaki hidung belang, pemasok PSK, mucikari, pemilik rumah bordil, dan para mafia lainnya yang mereguk keuntungan dari bisnis prostitusi tersebut.

Sebagaimana bisnis lainnya, prostitusi muncul karena ada permintaan dan pasokan. Ada permintaan dari lelaki hidung belang untuk menyalurkan hasrat seksual mereka. Dalam budaya patriarki, perempuan memang dianggap sebagai obyek seks bagi laki-laki. Tingginya permintaan tersebut dipenuhi oleh para mafia dengan memasok perempuan-perempuan yang bersedia menjadi obyek seks. Akhirnya perempuan yang terdesak kebutuhan ekonomi, paling rentan masuk ke lingkaran setan bernama prostitusi ini.

Umumnya tidak ada perempuan di dunia ini yang bercita-cita menjadi seorang PSK. Akan tetapi, pilihan hidup yang tersedia kepada mereka amat terbatas, karena sebagian besar PSK berpendidikan dan berkecakupan rendah. Pilihan ini bisa dimengerti, karena dunia prostitusi memberikan iming-iming penghasilan yang lebih besar dan instan. Meski akhirnya melepaskan diri dari jeratan

mafia prostitusi juga tak semudah membalikkan tangan.

Namun seburuk-buruknya stigma yang melekat di masyarakat, jarang orang yang peduli bahwa ada keluarga kecil PSK yang akhirnya tetap bisa meneruskan hidup. Walaupun (berdasarkan wawancara di buku ini) para PSK mengetahui dampak apa yang akan mereka tanggung seperti dikucilkan dari masyarakat dan tertular penyakit mematikan HIV/AIDS.

Sayangnya penyelesaian masalah prostitusi ini lebih banyak menggunakan pendekatan agama. Padahal prostitusi juga tumbuh subur di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, Iran dan Malaysia. Aspek ekonomi, sosial dan budaya seharusnya menjadi pertimbangan yang tak kalah penting untuk menuntaskan lokalisasi. Termasuk mencegah perempuan-perempuan di bawah umur terjerat mafia prostitusi.

Demi kesempurnaan buku ini, kritik dan saran Anda sangat kami nanti. Semoga buku Kelam di Padang Bulan bermanfaat bagi Anda. Selamat membaca!

Banyuwangi, 15 November 2013

Penerbit

Pengantar Penulis

Tulisan ini hanyalah sebuah hasil kegelisahan yang tertuang dalam ide dan sebagai bentuk pengabdian pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Gambaran hasil penelitian diperoleh dari realita langsung di objek penelitian. Saya memahami tulisan ini bukanlah karya utuh, sebagaimana layaknya tulisan yang baik. Saya hanya ingin menjadi bagian dari komunitas penulis yang sedang belajar. Bahwa Indonesia yang saya pahami adalah negara yang miskin kaum intelektual dan pintar mengkritik tetapi tidak mau mengevaluasi diri dan sebagian ada yang ikut aliran kebatinan (*mendem roso*), kaum nasionalis sejati yang haus kekuasaan, nasionalis dijadikan reklame dengan melebur diri dalam sistem politik lalu meninggalkan dunia intelektual.

Persoalan pelacuran menjadi perbincangan yang belum selesai sejak adanya manusia. Namun, seburuk apapun penilaian masyarakat pada umumnya terhadap pekerja seks komersial (PSK), mereka juga tetap manusia yang punya rasa malu, punya keinginan untuk dihargai oleh manusia yang lainnya. Para PSK tersebut tetap saja memiliki hak-hak dasar atau hak asasi yang harus dibela dalam banyak hal. Terutama manakala dia dilecehkan,

teraniaya, dan jika hak-haknya ditindas oleh orang lain maka pemerintah ikut bertanggungjawab dengan nasib mereka yang sampai sekarang dipandang sebelah mata. Mestinya segala bentuk eksploitasi terhadap mereka harus dihentikan.

Namun kenyataannya, masyarakat sudah membangun stigma bahwa hanya perempuan yang "menjual tubuhnya" yang diidentikkan sebagai "pelacur". Selain itu perbuatan ini seakan dianggap paling buruk dan hina yang sudah dibangun oleh masyarakat. Sebutan "pelacur" sudah terlanjur diperuntukkan bagi perempuan yang menjual tubuhnya (seks) demi uang.

Akan tetapi, manusia yang melakukan perbuatan tidak baik lainnya luput dari sebutan ini. Termasuk mereka yang "menjual kebenaran" (kejujuran dan keadilan) yang merupakan nilai-nilai dasar dari kehormatan manusia. Perbuatan tidak baik lainnya seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang banyak melibatkan petinggi negara. Bahkan lebih ironi ada beberapa tokoh yang mengatasnamakan agama, tidak lepas dari perilaku korup tersebut. Tidak sedikit para perampok uang negara itu merasa bangga berbuat demikian dengan bergaya hidup mewah. Seolah-olah dunia ini panggung sandiwaranya: orang yang haus kekuasaan dengan ditutupi tirai-tirai dan simbol-simbol pembenaran agar ada pengakuan bahwa

dirinya sebagai sosok pencerah dari segala peradaban.

Berdasarkan pemahaman ini, bukankah sebutan pelacur terasa semakin tidak adil jika hanya ditujukan pada para perempuan (PSK) yang menjual tubuhnya demi uang. Kedua; bila ditinjau dari segi moralitas, perempuan yang menjual tubuhnya demi uang sering dikatakan sebagai perempuan yang sudah hilang kehormatannya. Padahal, para koruptor, kolutor, manipulator, dan perilaku kotor lainnya yang jelas-jelas menjual kebenaran (kejujuran-keadilan) pada dasarnya juga menjual kehormatan. Dengan demikian, kalau mau jujur mereka pun sebenarnya bisa dianggap telah hilang kehormatannya.

Ironisnya, di antara mereka yang melakukan berbagai perilaku kotor tersebut malah seringkali (merasa atau dianggap) terpandang mulia dan terhormat di mata masyarakat. Sedangkan mereka, melakukannya tidak hanya demi uang, tetapi juga demi jabatan atau kedudukan (kekuasaan). Suatu perbuatan yang dimotivasi bukan karena keterpaksaan melainkan karena keserakahan. Jadi, sekali lagi, bukankah sesungguhnya mereka pun pantas disebut sebagai pelacur bahkan melacurkan diri sehingga dianggap sebagai manusia yang telah hilang kehormatan dirinya.

Kehidupan menjadi pelacur sangat rentan dengan segala macam pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan satu pihak, yaitu PSK. Pernyataan ini tidak akurat karena PSK tidak menjajakan diri atau tubuh. Justru laki-laki 'hidung belang' yang mencari mereka. Persoalan bukan terletak pada PSK, tapi laki-laki 'hidung belang'. Kalau saja tidak ada laki-laki yang mencari PSK tentulah tidak ada PSK di sana.

Biar pun kegiatan pelacuran ditutup, tidak menjamin tidak akan ada praktek pelacuran. Pandangan masyarakat yang selalu dituding sebagai 'penyakit masyarakat' adalah PSK yang ada di lokasi. Padahal, kegiatan pelacuran yang melibatkan PSK tidak langsung justru jauh lebih besar dan berpotensi terjadi pada cewek kafe, cewek SPG, cewek disko, anak sekolah, mahasiswi, cewek panti pijat, dan ibu rumah tangga. Ini justru yang harus mendapatkan penanganan lebih serius karena mempunyai efek yang lebih besar pengaruhnya.

Karya ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung. Pro dan kontra sudah biasa, namun yang utama sesungguhnya bagaimana melihat persoalan lokasi secara holistik, tidak semata-mata karena berdosa atau tidak berdosa. Setiap agama apapun memang melarang adanya perzinahan dan tidak ada negara yang melegalkan pelacuran, ini yang harus

dipahami. Oleh karena itu, diperlukan solusi atau alternatif bagaimana tidak terjerumus dalam lembah pelacuran. Namun, realitanya penyelesaian aktivitas prostitusi tersebut selalu ditempuh dengan jalur kekerasan dan menghakiminya.

Ada dua pertanyaan besar yang perlu dicari jawaban dan solusinya. Pertama, adanya lokalisasi, berarti ada tempat khusus yang sudah terlokalisasi dan resiko penyakit bisa ditangani. Jika dipaksa ditutup resiko penularan penyakit akan semakin meluas ke manusia yang lainnya. Kedua, menyadarkan dan menghadang para lelaki hidung belang agar tidak masuk ke lokalisasi. Jika lokalisasi sepi dengan sendirinya mereka berhenti karena tidak ada satupun lelaki yang tertarik.

Menangani masalah sosial tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Memang akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi satu kelompok jika daerahnya terbebas dari pelacuran. Namun, efek pindahnya dari kota sebelumnya ke kota lain tidak pernah menjadi kajian dan pertimbangan yang mendasarkan pada kemanusiaan. Bukannya kota satu dan kota lainnya adalah bagian dari yang satu yaitu Indonesia? Seandainya menjadi warga negara lain, apakah kita tega melihat saudara kita tertular HIV atau terpengaruh? Inilah kemanusiaan.

Tanpa dukungan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. karya ini tentunya tak akan

mungkin ditulis dan diselesaikan. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Mas Suseno telah meminjamkan buku tentang fenomenologi politik dan memberikan banyak ilmu dan diskusi yang tak kenal ruang dan waktu, Mas Bambang Basuki (Dayun) atas motivasinya dan dukungannya, Mas Harji yang selalu terbuka dirumahnya menerima penulis untuk diskusi dan banyak buku yang dipinjamkan, Ki Kamino yang selama ini banyak memberikan pemantapan dan spiritual. Teman diskusi Waris, Mahfud, Kadek, Matali, Ika Ningtyas (Koseba) dan rekan yang lainnya sehingga menghasilkan ide liar dan cemerlang. Teman-teman organisasi pergerakan yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang saat ini masih konsisten memperjuangkan wong cilik. Kepada, para PSK lokalisasi Padang Bulan, mucikari dan para pengurus yang telah memberikan data sebanyak-banyaknya walaupun pada awalnya sangat sulit, sehingga menuntut peneliti untuk terlibat langsung sehingga mengerti apa yang sebenarnya orang lain belum sepenuhnya mereka melihat realita, menyadari, merasakan pahit manisnya sebagai penghuni lokalisasi. Tak lupa juga buat yang telah menemani dan memberikan kepercayaannya bahkan dukungan yang tak ternilai harganya yaitu Sri Suci Dewi W dan Moh. Rafillah PM.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas semua bantuan

yang telah diberikan, semoga semua ilmu yang penulis miliki serta laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis dan pembaca.

Penulis

Miskawi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender sesungguhnya telah menempatkan posisi kaum wanita pada tingkatan yang sama dengan kaum pria. Kini, kaum wanita telah mendapatkan pengakuan yang sama untuk melakukan berbagai aktivitas publik yang dulu dianggap terlarang untuk dilaksanakan oleh kaum wanita. Dalam kehidupan rumah tangga, keberadaan kaum wanita bukan hanya sebagai penyandang peran domestik (seorang ibu rumah tangga). Namun, kaum wanita juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi dan di bidang politik. Menurut Toler (1984) pada umumnya, motivasi perempuan untuk bekerja di ranah publik didasari oleh kepentingan ekonomi rumah tangga, mendapatkan kemandirian, belajar menghadapi tantangan sosial ekonomi, dan untuk meningkatkan status sosial ekonominya. Namun, bagi rumah tangga miskin penghasilan seorang perempuan dari usaha ekonomi memberi

kesempatan untuk memegang peranan yang penting dalam ekonomi rumah tangga.

Perubahan persepsi yang semakin baik terhadap perempuan seiring dengan arah kebijakan pembangunan yang menempatkan wanita sebagai target pemberdayaan, sehingga memiliki kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah. Adapun program pembangunan yang dikembangkan adalah program peningkatan peranan kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dengan kegiatan pokok pada beberapa aspek, yaitu: pendidikan dan pelatihan ketrampilan perempuan, perlindungan tenaga kerja perempuan, dan pengembangan kelembagaan atau organisasi perempuan (Kusnadi, dkk, 2006). Namun demikian, tidak semua kaum wanita terjangkau oleh program pembangunan ini, sehingga masih banyak kaum wanita yang melakukan aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi dan pandangan masyarakat. Salah satunya adalah mereka yang bekerja sebagai PSK.

Menurut Purwanto (2008) salah satu alasan yang melatar belakangi kaum wanita bekerja sebagai PSK adalah masalah ekonomi keluarga. Fakta yang disampaikan Purwanto tersebut telah

memberikan gambaran tentang sebagian peran dan resiko menjadi seorang PSK. Kondisi ini yang sangat memprihatinkan sekali, predikat dan label yang diberikan masyarakat kepadanya sebagai manusia rendah, tidak bertuhan, kotor, suka merusak, sampah masyarakat dianggap paling tepat, masyarakat yang tanpa moralitas, perusak tatanan sosial, pemuas nafsu yang binal.

Sepanjang sejarah peradaban manusia kedudukan PSK tampaknya tidak pernah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari kelompok sosial dalam masyarakat yang memiliki kedudukan setara dengan kelompok masyarakat seperti umumnya. Stigma yang dibangun oleh masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh yang paham pada persoalan agama termasuk ukuran dosa dan ukuran neraka bahkan ukuran masuk surga. Logika kaum agamawan adalah bahwa hidup harus diatas aturan agama, tanpa memperdulikan kehidupan realitas yang ada. Hubungan seksualitas dianggap benar dan sah jika sudah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan agama. Jika pandangan ini terus diberikan kepada PSK maka pandangan tersebut telah menjadikan mereka sebagai orang yang terbuang secara struktural dan kultural sekaligus. Bahkan, tidak

sedikit tokoh-tokoh politik yang berada di bawah naungan agama terlibat kasus korupsi, suap-menyuap dan main perempuan.

Menurut Siregar (1982) pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan satu pihak, yaitu PSK (pelacuran wanita) yang hanya menjadi sorotan, sedangkan pelacuran laki-laki atau gigolo dan laki-laki hidung belang, tidak mendapatkan tuduhan apapun. Hal inilah yang menyebabkan adanya bentuk manifestasi ketidakadilan gender. Maka, pandangan masyarakat tersebut terhadap kehidupan PSK pada kenyataannya tetap menunjukkan bahwa PSK tidak diterima kehadirannya dan perlu segera diatasi. Siapapun tidak akan mengingkari bahwa dunia pelacuran bukanlah pilihan utama setiap kehidupan sosial manusia. Bahkan, tidak ada seorangpun yang memiliki cita-cita menjadi pelacuran. Namun, kehidupan sosial yang akhirnya mengantarkan seseorang menjalani kehidupan kelim.

Masyarakat pada umumnya menyalahkan satu pihak, yaitu para PSK sebagai pihak yang bersalah. Padahal dalam kenyataannya prostitusi sangat tergantung pada permintaan dan penawaran. Dalam sosial jual beli (transaksi ini) kedua pihak tersebut secara penuh terlibat dan

berperan seimbang, selama itu pula prostitusi akan terus berlangsung (Krisna, 1979). Syaiful W. Harahap (2011) mengatakan, persoalan bukan terletak pada PSK, tapi laki-laki 'hidung belang'. Kalau saja tidak ada laki-laki yang mencari PSK tentulah tidak ada PSK di sana. Hal ini mengisyaratkan bahwa pada kenyatannya keberadaan PSK tidak dapat disalahkan begitu saja.

Kaum pelacur ini adalah yang paling rentan dari banyak sisi. Mereka juga paling rentan terhadap terjangkitnya penyakit kelamin, seperti HIV - AIDS, yang merupakan penyakit yang mematikan. Para pelacur berani mengorbankan diri, masa depan dan kehidupannya tidak lain hanya untuk mendapatkan uang. Padahal hasil kerja kerasnya tidak menjadi miliknya secara utuh, tetapi disisi lain ada yang diuntungkan dari hasil kerja kerasnya.

Para PSK juga merupakan bagian dari kelompok sosial dalam masyarakat yang seharusnya mendapatkan pengakuan yang sama. Tidak selayaknya stigma baik dan buruk terus dilontarkan pada kelompok yang cenderung termarginalkan ini. Sebenarnya ada beberapa peran penting yang secara implisit telah dimainkan oleh para PSK ini. Termasuk di dalamnya dalam bidang

ekonomi bagi kehidupan keluarganya. Secara tidak langsung keberadaan PSK telah menjadi katub penyelamat bagi kehidupan ekonomi keluarganya, terlebih dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang kian hari kian memprihatinkan. Namun demikian, peran penting ini tak pernah dilihat secara bijak oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat cenderung melihat hanya dari satu sisi yang cenderung subjektif dan menghakimi. Atas dasar pemikiran inilah maka keberadaan PSK sebagai bagian dari kelompok sosial masyarakat merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji.

Dalam melakukan aktivitas kerjanya, keberadaan PSK dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan. Pertama, PSK kelas rendahan yang pada umumnya berada di jalanan dan rumah-rumah bordir. Kedua, PSK menengah yang berada di bordir-bordir yang cukup bersih dan pelayanannya baik. Ketiga, PSK kelas tinggi yang biasanya tinggal di rumahnya sendiri (terselebung) dan hanya menerima panggilan dengan perantara yang cukup rapi dan bayarannya cukup mahal (Soedjono, 1974).

Biasanya PSK pada golongan kedua melakukan aktivitas kerja dan juga tinggal di sebuah kompleks lokalisasi yang mendapat pengawasan ketat oleh pemerintah. Penempatan

PSK di kompleks lokalisasi merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi dampak negatif akibat aktivitas PSK yang dipandang amoral. Oleh karena itu, biasanya lokalisasi di tempatkan di pinggiran kota agar jauh dari lingkungan masyarakat umum dan dapat diharapkan untuk tidak mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya (Soedjono,1974).

Biasanya lokalisasi berada di sekitar daerah pantai ataupun pegunungan yang jauh dari keramaian kota. Namun demikian lokalisasi juga berada di daerah strategis yang sangat mudah di jangkau oleh akses publik. Salah satu lokalisasi yang berada di daerah yang mudah dijangkau oleh akses publik ini adalah lokalisasi Sumber Loh, yang lebih terkenal dengan sebutan Padang Bulan yang berada di Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Lokalisasi ini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Lokasinya berada sekitar 17 km dari pusat kota Banyuwangi. Selain itu, lokalisasi tersebut sangat mudah dijangkau transportasi umum yang siap melayani 24 jam.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur di Pulau Jawa yang secara administratif terletak

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Sehingga tidak salah jika lokalisasi dijadikan tempat persinggahan dari luar Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil pengamatan awal bahwa lokalisasi pengunjungnya tidak hanya berasal dari lokal Banyuwangi, akan tetapi juga berasal dari beberapa kota di sekitar Banyuwangi, bahkan ada juga wisatawan asing yang menyempatkan diri untuk singgah di lokalisasi di Padang Bulan.

Berdasarkan studi awal juga diketahui bahwa lokalisasi Padang Bulan dihuni oleh para PSK yang berasal dari berbagai daerah Jawa Timur. Bahkan ada beberapa PSK yang berasal dari luar Jawa (Madura, Bali, dan Kalimantan). Umumnya motif ekonomi menjadi hal yang melatar belakangi mereka sebagai PSK. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lokalisasi memainkan peran penting dalam bidang ekonomi bagi keluarga para PSK. Namun demikian, peran ekonomi yang dimainkan oleh para PSK bagi keluarga sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. Atas dasar inilah, maka dipandang perlu untuk mengkaji

secara mendalam mengenai peran PSK dan tafsiran atas stigma negatif.

1.2 Ruang Lingkup dan Permasalahan

Hal pokok yang menjadi penekanan penelitian ini, yaitu dinamika kehidupan PSK baik tekanan secara struktural dan kultural, kehidupan berketuhanan dan peran PSK dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi serta peranannya dalam keluarga.

Peran PSK adalah kedudukan dan fungsi seorang wanita yang bekerja sebagai PSK yang berada di lingkungan prostitusi. Kebutuhan ekonomi adalah segala hal yang harus dipenuhi manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berupa sandang, pangan, papan dan segala hal dan jenis keperluan lainnya. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang beranggotakan ayah, ibu dan anak. Dapat juga beranggotakan individu lain yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga inti tersebut.

Jadi yang dimaksud dengan peran PSK dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga adalah kedudukan dan fungsi seorang wanita yang

bekerja sebagai PSK yang berada di lingkungan prostitusi untuk mendapatkan segala hal yang harus dipenuhi manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berupa sandang, pangan, papan dan segala jenis kebutuhan lainnya untuk kepentingan keluarga.

Batasan penelitian ini dibagi menjadi tiga hal, yaitu batasan ruang lingkup waktu, tempat dan materi. Batasan ruang lingkup waktu dalam penelitian ini berkaitan erat dengan sejarah lokalisasi mulai dari awal berdirinya sampai dengan sekarang. Ruang lingkup special atau tempat dalam penelitian ini dilakukan di lokalisasi Padang Bulan di Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Penelitian lokalisasi Padang Bulan dengan pertimbangan lokalisasi tersebut merupakan satu-satunya lokalisasi resmi dengan jumlah PSK terbanyak dibandingkan dengan lokalisasi liar lainnya. Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah sejarah lokalisasi, dinamika kehidupan baik tekanan secara struktural dan kultural, kehidupan berketuhanan, faktor pendorong wanita bekerja sebagai PSK, peran PSK dalam bidang ekonomi keluarga, persepsi masyarakat terhadap PSK dan bentuk

pembelaan PSK yang ada di lokasi Padang Bulan.

Berdasarkan ruang lingkup penelitian yang diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah Lokasi Padang Bulan?
2. Bagaimana stigma negatif keberadaan pelacuran?
3. Faktor apakah yang mendorong perempuan bekerja sebagai PSK di lokasi Padang Bulan?
4. Bagaimanakah peran PSK di bidang ekonomi bagi keluarganya?
5. Bagaimanakah bentuk pembelaan PSK terhadap stigma penilaian masyarakat?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Marginalisasi Perempuan dan Pelacuran

Menurut Scott (1986) analisis kritis mengenai marginalisasi terbagi menjadi empat yaitu: sebagai proses pengucilan, sebagai proses pergeseran perempuan ke pinggiran, sebagai proses feminisasi atau segregasi, dan sebagai proses ketimpangan ekonomi yang mulai meningkat.

Menurut Handayani dan Sugiarti (2006) marginalisasi disebabkan oleh perbedaan gender. Bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah proses marginalisasi atau pemiskinan terhadap perempuan. Marginalisasi atau disebut juga dengan pemiskinan ekonomi. Ada beberapa mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena dari segi sumbernya berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi atau kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Menurut Handayani dan Sugiarti (2006) perbedaan jenis kelamin juga melahirkan perbedaan gender yang pada akhirnya mengarah kepada

marginalisasi perempuan. Hal ini juga ditambahkan oleh Saptari dan Holzner (1997) bahwa pada prinsipnya, perbedaan jenis kelamin pada dasarnya merupakan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, merupakan hasil pengkotakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat serta dukungan oleh nilai-nilai tertentu, bukan merupakan perbedaan yang disebabkan karena perbedaan biologis semata.

Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki.

Dalam masyarakat Jawa misalnya, stereotip negatif pada perempuan dapat dilihat pada ungkapan *swarga nunut neraka katut dan kanca wingking*, karena nasib perempuan dipandang lebih rendah. Perannya dibatasi pada tugas-tugas domestik yaitu sekitar sumur, dapur, dan kasur. Peranan yang demikian dianggap sebagai peranan yang ideal bagi seorang perempuan. Pandangan demikian masih berakar kuat pada sebagian masyarakat Jawa dan penolakan terhadap stereotip negatif tersebut terus berlangsung seiring dengan meningkatnya emansipatoris (Shuhardati dan Sofyan, 2001).

Menurut Bhasin (1996) di dalam rumah tangga perempuan memberikan semua pelayanan

untuk suami, anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Di dalam rumah tangga, laki-laki mengendalikan dan membatasi peranan publik perempuan. Gejala demikian oleh Sylvia Walby disebut model produksi patriarkal yang merugikan kaum perempuan.

Sejak dilahirkan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan berbeda dalam penyambutannya oleh sebagian orang tuanya. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan gender tersebut. Gender merupakan sifat-sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Misalnya sifat laki-laki cenderung rasional, perempuan cenderung emosional. Hal itu adalah gender yang bisa saja dipertukarkan menjadi sebaliknya. Sebagai bukti tidak sedikit perempuan menjadi manusia besi, yang ulet lebih rasional dan perkasa. Sehingga dapat mencapai puncak karir dalam hidupnya yang lebih tinggi. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan banyak hal yang bisa berlaku simultan, di antaranya dikonstruksi dan disosialisasikan secara kultural, melalui norma-norma masyarakat dan hegemoni suatu kekuasaan.

Perbedaan gender memojokkan jenis kelamin tertentu. Perkembangan berikutnya

menumbuhkan ketidakadilan gender terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan melalui berbagai bentuk. Proses pemiskinan ekonomi dan marginalisasi kaum perempuan serta adanya anggapan bahwa perempuan tidak penting untuk ikut dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, masyarakat, maupun keputusan politik adalah bentuk ketidakadilan. Belum lagi stereotip dan stigma negatif yang dilekatkan pada diri kaum wanita. Sehingga posisi penting dalam masyarakat jarang bisa diberikan dalam masyarakat. Hal tersebut timbul karena ketidaksetaraan kekuatan pandangan terhadap gender dalam masyarakat. Beberapa pemikiran akan digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan menyangkut eksistensi PSK. Salah satu pemikiran yang dijadikan acuan adalah dari teori neo-klasik yang cenderung melihat bahwa sumbangan ekonomi perempuan terhadap perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan *human capital* yang kemudian berakibat bahwa laki-laki lebih potensial bekerja di luar rumah dari pada perempuan. Kalau perempuan bekerja mencari nafkah, maka pendapatan yang diperoleh akan lebih rendah dari pada pria. (Kutanegara dan Wattie, 1994)

Bila ada yang berpendapat bahwa penyebab subordinasi perempuan, yang menomorduakan kaum perempuan dari pada kaum pria, selain adat-istiadat adalah agama, tidak selalu benar. Bila ada pandangan agama yang mempersepsikan bahwa perempuan tugasnya hanya melayani suami dan harus patuh tanpa *reserve*, adalah suatu penafsiran yang terhegemoni oleh sistem paternalistik. Situasi patriarkat telah melahirkan kubangan sejarah yang diskriminatif, eksploitatif dan ketidakadilan gender dalam struktur masyarakat.

Menurut Suranto (2002) bahwa pendapatan yang diperoleh perempuan apabila lebih besar dari pendapatan suaminya, maka dengan dasar inilah mereka berusaha mencari kebebasan di luar rumah termasuk kebebasan seks. Pendapat ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Dr. Naek L. Tobing yang menunjukkan bahwa penyebab utama wanita karier yang telah berumah tangga memiliki PIL (pria idaman lain) adalah karena telah terbiasa tinggal lebih lama di luar rumah dan kurangnya kasih sayang (Tobing dalam Abdullah, 1996).

Rendahnya pendapatan wanita dari pekerjaan sektor ekonomi dicoba dijelaskan oleh teori segmentasi tenaga kerja yang melihat bahwa

wanita terjun pada jenis pekerjaan sekunder tertentu, sebagai akibat hambatan kelembagaan, seperti rendahnya akses mereka dalam kegiatan ekonomi dan pendidikan (Nasikun, 1990).

Salah satu bentuk diskriminasi gender di Indonesia adalah pelacuran yang terdefiniskan sebagai penyediaan pelayanan seksual dengan imbalan uang. Akhir-akhir ini kalangan feminis memperkenalkan istilah pekerja seks komersial untuk mengangkat posisi sosial pelacur menjadi setara dengan orang pencari nafkah yang lain. Hal itu sebenarnya berlaku tidak hanya bagi perempuan tetapi juga laki-laki dan kaum *transvertit* (seseorang yang secara anatomis laki-laki, tetapi secara psikologis merasa menganggap dirinya seorang perempuan) serta laki-laki homoseksual. Meskipun pada umumnya hanya kaum laki-laki homoseks yang memerlukan pelacur laki-laki, akhir-akhir ini ada kecenderungan jasa tersebut dipergunakan kaum perempuan. Sebelum adanya istilah pekerja seks komersial, di Indonesia oleh kalangan resmi diperkenalkan istilah "wanita tuna susila" (WTS) bagi kaum pelacur. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa pelacuran hanya dilihat dari aspek kesusilaan dan hanya di tujukan pada perempuan yang menjadi pelacurnya, tetapi tidak

kepada lelaki, atau konsumen yang menggunakan jasa mereka. Alasan klasik dari pelacuran masa sekarang adalah kemiskinan.

Penyelesaian masalah pelacuran ini akan sangat tergantung kepada bagaimana kita melihat hal tersebut. Betapapun juga pelacuran merupakan masalah yang tidak dapat diberantas dengan mudah. Banyak negara yang tegas-tegas memiliki undang-undang anti pelacuran, seperti Thailand dan Indonesia, tetapi semua orang juga mengetahui bahwa pelacuran tetap hadir di negara tersebut.

Saptari dan Holzner (1997) menambahkan bahwa penyebab banyak wanita menjadi pelacur atau WTS/PSK antara lain: pertama karena hilangnya keperawanan. Dalam ideologi gender, masyarakat beranggapan bahwa keperawanan dinilai dan diterima sebagai ciri perempuan yang sangat penting dan yang sangat perlu dipertahankan selama ia belum kawin. Sebaliknya, jika seseorang diketahui (atau dianggap telah kehilangan keperawanannya akibat peristiwa pemerkosaan atau terbujuk oleh seorang laki-laki, maka kemudian muncul pandangan bahwa sekali sudah "rusak", nama baik tidak bisa diperoleh kembali. Akibatnya tidak ada jalan lain bagi mereka

kecuali masuk kedalam peran yang diciptakan untuk mereka yaitu menjadi seorang pelacur.

Kedua, bisnis pelacuran dengan sistem paksaan dan kekerasan hal ini sangat mengekang pelacur sehingga tak mungkin keluar dari jeratan si germo. Dalam beberapa kasus seperti dilaporkan di Thailand, tercatat bahwa orang tua yang miskin mengirim anak-anaknya ke calo-calo tenaga kerja yang kemudian oleh calo tersebut mereka dimasukkan ke pusat-pusat pelacuran. Uang hasil bayaran mereka kirimkan ke orang tua, sementara itu orang tua tersebut tidak mengerti sepenuhnya pekerjaan yang dilakukan anak mereka

2.2 Sejarah Berdirinya Pelacuran

Asal-usul pelacuran modern di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa kerajaan-kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Dua kerajaan yang sangat lama berkuasa di Jawa berdiri tahun 1755 (berdasarkan Perjanjian Gianti) ketika kerajaan Mataram terbagi dua menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Mataram merupakan kerajaan Islam-Jawa yang terletak di sebelah selatan

Jawa Tengah. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia (*binatara*). Kekuasaan raja Mataram sangat besar. Kekuasaan raja yang tak terbatas ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan (Terence Hull, dkk. 1997 : 1-2).

Perempuan yang dijadikan selir tersebut berasal dari daerah tertentu yang terkenal banyak mempunyai perempuan cantik dan memikat. Reputasi daerah seperti ini masih merupakan legenda sampai saat ini. Koentjoro (1989:3) mengidentifikasi 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan; daerah tersebut masih terkenal sebagai sumber wanita pelacur. Daerah-daerah tersebut adalah kabupaten Indramayu, Karawang dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; serta Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur. Kecamatan Gabus Wetan di Indramayu terkenal sebagai sumber pelacur, dan menurut sejarah daerah ini merupakan salah satu sumber

perempuan muda untuk dikirim ke Istana Sultan Cirebon sebagai selir.

Bentuk industri seks yang lebih terorganisasi, berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kepuasan seks masyarakat Eropa. Aktivitas ini berkembang di daerah sekitar pelabuhan di Nusantara. Pemuasan seks untuk para serdadu, pedagang, dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke Nusantara. Isu tersebut telah menimbulkan banyak dilema bagi penduduk pribumi dan non-pribumi. Di satu sisi, banyaknya lelaki bujangan yang dibawa pengusaha atau dikirim oleh pemerintah kolonial untuk datang ke Indonesia, telah menyebabkan adanya permintaan pelayanan seks. Pada sisi lain, baik penduduk pribumi maupun masyarakat kolonial menganggap berbahaya mempunyai hubungan antar ras yang tidak menentu. Situasi pada masa kolonial tersebut membuat sakit hati para perempuan Indonesia, karena telah menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan secara hukum, tidak diterima secara baik dalam masyarakat dan

dirugikan dari segi kesejahteraan individu dan sosial.

Dua dekade kemudian, tanggung jawab pengawasan rumah bordil dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tahun 1852 secara efektif dicabut, digantikan dengan peraturan penguasa daerah setempat. Pengalihan tanggung jawab pengawasan rumah bordil ini menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan pemukiman membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat. Di Surabaya misalnya, pemerintah daerah telah menetapkan tiga daerah lokalisasi di tiga desa sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas pelacuran dan penyebaran penyakit kelamin. Selain itu para perempuan penjaja cinta dilarang beroperasi diluar lokalisasi tersebut. Semua pelacur di daerah lokalisasi ini terdaftar dan diharuskan mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala (Ingleson, 1986 : 127 - 128).

Sejarah industri seks di Surabaya sangat unik. Sebagai jalur perdagangan utama di Indonesia Timur, Surabaya pada saat penjajahan Belanda berkembang sebagai kota pelabuhan terkemuka, pangkalan angkatan laut, para tentara-garnisun dan sebagai daerah tujuan akhir lintasan kereta api.

Akibat dari perkembangan kota ini, pada abad ke-19 Surabaya menjadi terkenal karena aktivitas pelacurannya (Hull dkk, 1997 : 7). Menurut catatan resmi sejarah kota Surabaya dinyatakan bahwa pada tahun 1864 terdapat 228 perempuan yang mempunyai profesi sebagai pelacur di bawah pengawasan 18 pemilik rumah bordil. Dalam tulisannya pada tahun 1939, Simons (dalam buku pelacuran di Indonesia karangan terence Hull) membagi konsep pelacuran di Surabaya dalam delapan

kategori sebagai berikut :

1. Pelacur yang mangkal di kedai-kedai kecil sekitar pelabuhan dan di kota pelabuhan itu sendiri.
2. Pelacur yang beroperasi di jalanan, berasal dari kampung-kampung setempat.
3. Rumah-rumah bordil di pusat kota milik orang Cina dan Jepang.
4. Lokalisasi rumah-rumah bordil di kampung pinggiran kota.
5. Jasa pelayanan seks amat terselubung yang dilakukan oleh para nyonya (ibu rumah tangga) Belanda yang terkekang di rumah kepada perempuan muda yang belum menikah.

6. Jasa pelayanan seks terselubung yang diberikan oleh para pembantu rumah tangga perempuan lokal.
7. Pelacur warga negara Eropa yang terorganisir di lokalisasi tertentu.
8. Pelacuran homoseksual dan perjumpangan.

Pada kelompok pertama tersebut diatas, dapat di temui di warung-warung kopi di kawasan Tanjung Perak yang berfungsi menyediakan perempuan penghibur sebagai teman bersenang-senang, berdansa dan minum-minum. Pada kelompok kedua, para pelacur yang beroperasi di jalanan seringkali ditangkap polisi, oleh sebab itu mereka kerap kali dilindungi oleh germo yang menjamin dan bertanggungjawab mencari para pelanggan potensial. Pada kategori ketiga, di rumah bordil yang dikuasai oleh orang-orang Cina yang menampilkan perempuan-perempuan muda Cina yang masih sangat belia (Hull dkk, 1997 : 8 - 9).

Bagi pemerintah dan pengamat sosial sangatlah jelas, bahwa dengan perjalanan waktu, peraturan pemerintah daerah yang berkaitan dengan prostitusi benar-benar tidak memadai untuk mengimbangi pesatnya perkembangan industri seks dan tidak dapat pula mengimbangi

percepatan penyakit menular. Haga (1901 : 531 - 538) menyimpulkan bahwa tantangan dalam dunia kesehatan berkaitan dengan tiga hal pokok: pertama, ada sejumlah pelacur yang beroperasi tidak terdaftar sehingga mereka biasanya tidak diperiksa. Kedua, meskipun mereka telah terdaftar, keberadaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan tidak memadai untuk menangani pemeriksaan kesehatan bagi para pekerja seks ini secara teratur setiap minggunya. Sehingga, tantangan pokok ketiga adalah bahwa pemerintah harus memikirkan jalan untuk selalu menambah fasilitas pemeriksaan kesehatan dengan memprioritaskan kegiatan pencegahan dan penanganan penyakit menular.

Komersialisasi seks di Indonesia terus berkembang selama pendudukan Jepang antara tahun 1941 hingga 1945. Wanita yang telah bekerja sebagai perempuan penghibur dikumpulkan dan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, sebagian dari mereka ditempatkan di rumah-rumah bordil untuk melayani para prajurit Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak perempuan dewasa dan anak-anak sekolah yang tertipu atau dipaksa memasuki dunia pelacuran. Bangsa Jepang menawarkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik di Tokyo atau kota-kota besar di Indonesia

lainnya kepada sejumlah pelajar perempuan. Mereka dibawa dari kota atau dari desa tempat asalnya ke daerah-daerah sekitar pelabuhan Semarang (Semarang Club, Shoko Club, Hinomuram, dan Futabaso), ke Surabaya (Bangunrejo dan daerah sekitarnya), serta ke Jakarta (Tanjung Priok) dan mereka diinstruksikan untuk bersiap-siap berangkat ke luar negeri. Kenyataannya gadis-gadis ini tidak pernah beranjak dari tempat penampungan, bahkan mereka dipaksa menjadi budak-budak seks, dilarang meninggalkan rumah bordil dan hanya sedikit peluang untuk bisa melarikan diri (Tempo, 1992:20).

Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, bangsa Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi. Kondisi para perempuan pekerja di industri seks selama masa penjajahan Belanda sangat berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi kelompok yang sama pada jaman Jepang. Sebuah dokumen majalah mingguan (Tempo, 1992:20) menyebut bahwa perempuan yang menjadi pelacur pada kedua masa itu, umumnya lebih menyukai kehidupan yang lebih tenteram pada masa penjajahan Belanda.

Sebaliknya, pada masa perang dan pendudukan Jepang, pekerjaan mereka terasa sulit. Kegiatan prostitusi tetap dicela masyarakat baik selama masa damai maupun masa perang, pada periode penjajahan maupun setelah merdeka.

Pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, besarnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota meningkatkan jumlah tenaga kerja wanita muda yang mencari pekerjaan sebagai pekerjaan upahan di sektor formal. Kebanyakan para wanita yang melakukan migrasi ini masih muda, tidak berpengalaman, tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas. Faktor lain yang mendorong para wanita muda masuk ke dunia prostitusi pada masa itu adalah karena tingginya angka tingkat perceraian terutama di kalangan keluarga di Jawa. Faktor jauh dari keluarga dan kebebasan dari kehidupan desa serta adanya fasilitas-fasilitas hiburan di kota, menarik para perempuan muda ini untuk masuk dalam dunia prostitusi. Lokasi tempat kerja yang paling mencolok dalam industri seks adalah di kompleks-kompleks pelacuran, tempat-tempat perempuan panggilan (*call-girl*), dan panti pijat (Terence Hull dkk, 1997 : 18 - 20).

Suatu aspek penting dari kebijaksanaan pemerintah di industri seks, yang menonjolkan ketidakpastian status hukum bagi prostitusi di Indonesia adalah pendirian lokalisasi resmi bagi para wanita tuna susila. Walaupun latar belakang pendirian lokalisasi pada abad lalu, pelacuran modern yang dibangun pada awal tahun 1960 merupakan salah satu bagian dari kampanye disiplin sosial dan pengendalian. Dalam kompleks seperti itu, rumah-rumah yang digunakan untuk beroperasi berjajar di sepanjang jalan dan keamanan dalam kompleks dikoordinasi oleh kelompok terpadu yang terdiri dari aparat pemerintah dan militer setempat. Lokalisasi resmi itu berada di bawah pengawasan Dinas Sosial di tingkat Kotamadya atau kabupaten.

Pada tahun 1961 kota Surakarta di Jawa Tengah menyatakan bahwa Kampung Silir mendapat pengecualian terhadap peraturan tahun 1953 yang melarang adanya prostitusi di kota tersebut. Dasar pemikirannya adalah dengan memusatkan kegiatan para pelacur dalam satu kawasan kecil, kota akan terhindar dari kegiatan transaksi seks di jalanan. Dengan mengakui dan memberi izin operasi sementara, pemerintah daerah setempat dapat memantau perilaku muncikari dan

para pekerja di industri seks, dan juga merupakan upaya untuk memantau perilaku klien yang menyimpang. Peraturan dari Kampung Silir yang dikeluarkan pada Januari 1967, mensyaratkan bahwa setiap pelacur yang baru datang harus mendaftar dan melaporkan kehadirannya kepada penguasa setempat selambat-lambatnya sehari sesudah kedatangannya dan diwajibkan untuk mengikuti semua peraturan yang berlaku termasuk jam kerja, mengikuti pemeriksaan kesehatan, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial yang dilaksanakan di lokasi setempat. Pola kegiatan di kompleks Kampung Silir ini kemudian diikuti oleh kompleks-kompleks pelacuran lain di berbagai kota di Indonesia. Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) mengendalikan atau mengatur secara resmi kompleks pelacuran dan rumah bordil. Muspida ini terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah, jaksa setempat, kepala polisi dan komandan militer setempat. Kelompok ini tak hanya mengatur, tapi juga berpartisipasi dalam mengelola prostitusi di kawasan seperti Kramat Tunggak di Jakarta dan Dolly-Jarak di Surabaya. Oleh sebab itu di kawasan ini praktek pelacuran berlangsung lebih aman dan efisien, dan hanya sedikit sekali terjadi perkelahian, penggunaan obat terlarang dan perampokan.

Penguasa setempat juga mengendalikan bangunan yang digunakan sebagai operasi dengan mengharuskan pembaruan izin operasi untuk setiap empat tahun. Peraturan semacam ini di implementasikan oleh penguasa setempat untuk mengendalikan pengembangan atau perluasan kawasan pelacuran.

2.3 Eksistensi PSK dan Dampaknya

Saptari dan Holzner (1997) menyatakan bahwa menghadapi masalah pelacuran masa kini serupa dengan masa kolonial. Pelacuran dianggap sangat berguna untuk melayani komunitas Belanda atau asing yang dianggap perlu diberi kesempatan untuk memperoleh hiburan. Disadari pula oleh pemerintah kolonial pada waktu itu bahwa para buruh pribumi laki-laki membutuhkan pelayanan seksual agar tidak lari meninggalkan tempat kerja. Sering kali biaya untuk membayar para pelacur cukup tinggi sehingga para buruh harus berhutang pada majikan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan mereka terus-menerus bergantung pada majikan dan terjadi hubungan patron klien, Mulai tahun 1852 pada zaman kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang

melembagakan pelacuran agar dapat diawasi dan diatur secara lebih baik, lagi pula apabila dijalankan pelarangan akan terjadi pelacuran gelap, ini akan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit kelamin yang tidak dapat diawasi baik penyebaran maupun pengobatannya.

Menurut Rai (1994) pada umumnya dari segi pendidikan para wanita PSK berpendidikan rendah. Hal ini dapat dipandang bahwa biasanya masyarakat dari golongan ekonomi miskin memiliki kemampuan yang rendah dalam menjangkau pendidikan yang layak, sehingga mereka berpendidikan rendah. Jika para PSK berpendidikan rendah, maka kemungkinan besar mereka berasal dari golongan ekonomi rendah. Dengan demikian ketika mereka bekerja sebagai PSK merupakan satu cara untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Pada dasarnya disinilah eksistensi PSK itu nampak nyata.

Peranan perempuan dalam aktivitas mencari nafkah, yakni sebagai PSK dijelaskan berdasarkan teori gender yang melihat persoalan dengan memakai model penjelasan pembagian kerja secara seksual. Menurut teori ini, setiap masyarakat mengembangkan suatu konstruksi sosial budaya yang mengkategorikan pekerjaan-

pekerjaan tertentu sebagai pekerja pria pekerja wanita (Moore, 1988). Berdasarkan model ini, teori gender mencoba menerangkan bahwa perempuan kalah beruntung dibanding pria dalam pasar tenaga kerja karena ideologi gender telah menggariskan perempuan untuk melakukan aktivitas reproduksi dan berbagai pekerjaan domestik yang diasosiasikan sebagai pekerjaan mereka (Nasikun, 1990). Adanya kondisi tersebut serta rendahnya pendidikan perempuan ditambah lagi dengan adanya tekanan kebutuhan ekonomi dan lain-lain, memang sangat memungkinkan seorang perempuan terjun memilih pekerjaan sebagai PSK (Rai, 1994).

Purnomo dan Sirigar (1985), mengemukakan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah peristiwa penyerahan badan perempuan kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi di luar pernikahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelacur atau wanita tuna susila (PSK) adalah perempuan yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual atau dengan kata lain, adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki di luar pernikahan,

dan sang perempuan memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyetubuhinya.

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh PSK terutama pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, adalah sebagai berikut: (1) menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terdapat ialah *syphilis* dan *gonorrhoe*. (2) merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, suami-suami yang tergodas PSK, biasanya melupakan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi kurang terurus dan bahkan berantakan (Kartono, 1983).

Sehubungan dengan pendapat Kartini Kartono, bahwa PSK akan dapat menyebarkan PMS seperti *gonorrhoe* dan *syphilis*, bahkan HIV/AIDS, Soekandar dan Prawiro (1981 mengatakan sama. Bahkan dikatakan bila perempuan kontak dengan pria, maka kesempatan yang lebih besar untuk menderita *gonorrhoe* adalah perempuan. Disamping itu perempuan yang terinfeksi sekitar 50-70% tidak menunjukkan gejala yang mudah dilihat.

Berdasarkan teori dan kasus di atas, Rosentock (1974) menyatakan bila individu (seseorang) ingin menghindari penyakit, maka individu harus percaya, (1) bahwa dia sendiri

mudah diserang penyakit, (2) bahwa terjadinya penyakit dapat melunakkan kesengsaraan hidupnya, dan (3) melakukan tindakan tertentu sebenarnya akan bermanfaat dalam mengurangi kelemahan kondisi kehidupannya.

2.4 Peran Perempuan dalam Bidang Ekonomi bagi Kehidupan Keluarga

Menurut Kusnadi, dkk (2006) keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi hidup rumah tangganya, meningkatkan kapasitas diri, dan status sosial dalam struktur sosial masyarakatnya, tetapi juga memberi kontribusi terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat lokal. Dalam hal ini perempuan tidak hanya menjadi potensi sosial budaya, tetapi juga sebagai potensi ekonomi yang patut dipertimbangkan.

Menurut Friedl (1987) perempuan yang bekerja dan memiliki posisi ekonomi menjadi faktor yang menentukan dalam berhubungan dengan laki-laki, baik dalam aktivitas maupun dalam masyarakat. Seiring dengan berkembangnya ekonomi internal rumah tangga yang semakin baik dan peningkatan status sosial di masyarakat, kemampuan perempuan dengan mudah

mengontrol sumber daya ekonomi dalam rumah tangga. Dengan perkataan lain keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dapat memberi perubahan besar dalam kedudukan sosial di rumah tangga.

Menurut Sanday (1974) peranan domestik perempuan adalah peranan sosial yang terkait dengan aktivitas internal rumah tangga seperti memasak, mengurus anak dan melayani suami; sedangkan peranan publik adalah peranan sosial yang saling terkait dengan aktivitas sosial, ekonomi dan politik di luar rumah tangga. Jika dua hal peranan tersebut dapat dilakukan oleh seorang perempuan maka ia memainkan peranan ganda.

Pada umumnya motivasi perempuan untuk bekerja di ranah publik didasari oleh kepentingan di rumah tangga, mendapatkan kemandirian, belajar menghadapi tantangan sosial ekonomi dan untuk meningkatkan status sosialnya. Menurut Stoler (1984:184), kebebasan ekonomi seorang perempuan bukanlah fungsi dari ia bekerja, namun ia mendapatkan penghasilan yang teratur yang dapat diandalkan. Bagi rumah tangga miskin, penghasilan seseorang perempuan dari usaha ekonomi memberinya kesempatan yang lebih penting dalam ekonomi rumah tangga. Sebaliknya,

bagi rumah tangga yang lebih kaya, penghasilan seorang perempuan memberinya dasar material untuk kekuasaan sosial

2.5 Struktur dan Pola Lokalisasi

Lokalisasi merupakan tempat, daerah, kompleks, penampungan pramuria yang ada di suatu tempat. Berbicara mengenai lokalisasi tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan prostitusi atau pelacuran yang ada di dalamnya. Menurut Kartini Kartono (1987:203) prostitusi berasal dari kata *prostituere* (bahasa latin) yang berarti penonjolan diri dalam hal yang buruk atau tercela dan menyerahkan diri secara terang-terangan kepada umum. Di Indonesia istilah ini dikenal dengan pelacuran yang dapat diartikan sebagai penyerahan badan seorang perempuan dengan pembayaran, kepada laki-laki guna pemuas nafsu orang tersebut.

Adapun struktur dan pola prostitusi bermacam-macam bentuknya ada yang langsung tersedia di tempat-tempat pelacuran (rumah-rumah) yang dinamakan bordil yang biasanya dipelihara oleh germo dan bahkan menurut penelitian sebagian besar hasil kerja PSK yang

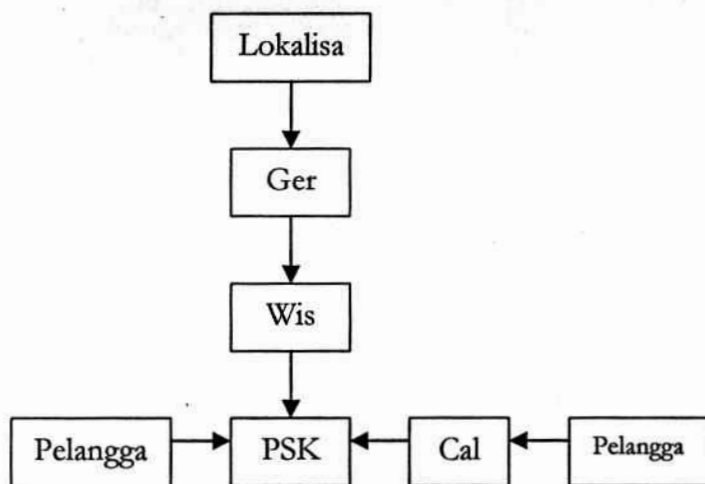
bersangkutan diambil oleh germo (Soedjono, 1974:115).

Ada pula pelacur-pelacur yang hanya melayani panggilan-panggilan untuk diajak ke suatu tempat tertentu seperti hotel, vila dan penginapan-penginapan tertentu. Pelacuran ini dinamakan *callgirl* (wanita panggilan). Wanita panggilan ini bisa dipanggil dari tempat penampungan yang diusahakan germo atau rumah tersendiri (melakukan secara terselubung). *Call girl* mempunyai jaringan yang cukup rapi, biasanya ada perantara-perantara yang pada umumnya dari kalangan tukang becak, sopir-sopir taksi (Soedjono, 1974:16).

Berdasarkan uraian di atas pelacuran memiliki berbagai jenis yang bisa dibedakan dari segi tempat dan tarif para PSK yang bersangkutan. Pendapat dari (Soedjono, 1974) mengkategorikan pelacuran atau PSK menjadi tiga macam, yaitu: (1) Pelacuran kelas rendahan yang umumnya berada di jalanan dan rumah-rumah bordil, (2) Pelacuran menengah yang berada di bordil-bordil yang cukup bersih dan pelayanan yang baik (3) pelacuran kelas tinggi yang biasanya para pramurianya tinggal di rumah sendiri (terselubung) dan hanya menerima panggilan dengan perantara yang cukup rapi

sehingga sulit diketahui dan bayarannya yang cukup mahal.

Menurut Krisna (1979:14) pelacuran terselubung ini timbul sebagai akibat dari penutupan kompleks lokalisasi yang ada di berbagai daerah. Pelacuran atau PSK ini biasanya berbentuk kerja sama yang dibuktikan misalnya pada tukang-tukang pijat yang ada di hotel. Adapun struktur lokalisasi dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar 1.1 Struktur Lokalisasi (Krisna, 1979)

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa di dalam suatu lokalisasi terdapat beberapa wisma. Wisma-wisma tersebut dihuni oleh

beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan di lokalisasi tersebut. Satu wisma dipimpin oleh satu orang geromo yang sekaligus memimpin beberapa PSK yang ada di wisma tersebut. Dalam melakukan transaksi antara PSK dan pelanggan ada satu komponen yang terlibat di dalamnya yaitu para calo atau perantara.

2.6 Pandangan Masyarakat terhadap Keberadaan PSK

Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, namun juga dibutuhkan (*evil necessity*). Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki); tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa kaum perempuan baik-baik.

Masyarakat pada umumnya menuduh pekerjaan PSK sebagai sumber penyakit yang

tumbuh di masyarakat karena mereka penyebar segala bentuk penyakit. Pada kenyataannya jika dilihat secara jeli kondisi sebenarnya justru sebaliknya. Faktor yang lebih berbahaya sebagai penyebar penyakit adalah pihak pelanggan pengunjung daerah-daerah prostitusi (Krisna, 1979)

Menurut Soedjono (1974) jika dibiarkan tanpa dicegah dan ditanggulangi maka lambat laun dapat dipandang masyarakat sebagai hal yang normal dan wajar. Dengan hal ini pemerintah harus terus-menerus menanggulangi, sedangkan kalau masih ada, itu dianggap sebagai penyakit yang harus tetap diupayakan penyembuhannya dan dicegah dan dihalangi timbulnya dengan meniadakan faktor-faktor penyebabnya.

Paparan diatas menunjukkan bahwa pandangan para PSK masih cenderung negatif dan bersifat menghakimi bahwa apa yang dilakukan oleh para PSK itu salah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah atau historis yang memperhatikan hubungan sebab akibat. Metode ini digunakan untuk menjelaskan tentang sejarah lokalisasi khususnya Lokalisasi Padang Bulan. Bentuk dari penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif-deskriptif sehingga akan menghasilkan data deskriptif. Menurut Moleong (1996:3) adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari perilaku-perilaku yang diamati. Sutopo (2006:39) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih bermakna dan mampu memicu timbulnya pemahaman yang lebih nyata dari pada sekadar sajian angka atau frekuensi. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh (holistik).

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal karena hanya ada satu objek yang dilakukan di Lokalisasi Padang Bulan Singojuruh. Penentuan lokasi penelitian dengan menggunakan metode purposif, yaitu menentukan tempat penelitian berdasarkan tujuan khusus yang ditetapkan oleh peneliti. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Lokalisasi Padang Bulan sebagai lokalisasi terbesar di Kabupaten Banyuwangi yang jumlah keseluruhan sebanyak 13 titik. Alasan penentuan lokasi penelitian ini karena relevan dengan tujuan penelitian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Dramaturgi. Teori ini dianggap penting sebagai pisau analisis. Teori ini berusaha memahami hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat dengan melihat dibalik layar kehidupan pelacuran. Teori ini berusaha mengungkap peran PSK dalam bidang ekonomi bagi keluarganya, latar belakang perempuan berperan sebagai PSK, persepsi masyarakat terhadap PSK dan bentuk pembelaan dari stigma negatif

Informasi berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber informasi primer berupa

informasi yang berasal dari pelaku. Penelitian informan dalam penelitian ini menggunakan tehnik *Snowball* atau bola salju. Menurut Malo dan Triagnias (1992) penarikan bola salju umumnya dilakukan melalui beberapa tahap yakni :

1. Menentukan satu atau beberapa orang informan untuk diwawancarai dan informan tersebut berperan sebagai titik awal penentuan informasi berikutnya.
2. Informan yang ditetapkan berdasarkan petunjuk informan sebelumnya, kemudian diadakan wawancara sebagai mana pengumpulan data selanjutnya. Hal tersebut dapat dihentikan apabila data yang sudah didapat mencapai titik jenuh.

Menurut Sugiyono (2005: 62) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan sumber data yang dimanfaatkan, untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian.

Pertama, wawancara. Menurut Cambell dan Khan (dalam Chaedwic) dkk, 1991: 121), wawancara adalah percakapan dua orang yang dimulai dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai

dengan penelitian yang dipusatkan oleh isi yang dititikberatkan pada tujuan deskripsi, prediksi dan penjelasan sistematis mengenai penelitian ini. Pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, yang sifatnya terbuka. Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang – ulang dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan alat bantu yaitu pedoman wawancara yang nantinya berfungsi untuk mengarahkan agar materi wawancara tidak keluar dari data yang digali oleh peneliti. Teknik wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari para informan adalah wawancara bebas mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah PSK Padang Bulan.

Kedua, Observasi. Teknik observasi digunakan untuk mengambil data langsung di lapangan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung yang bersifat partisipasi pasif. Teknik ini digunakan untuk mengamati dan menggali informasi mengenai perilaku dan kondisi lingkungan penelitian menurut kondisi yang sebenarnya

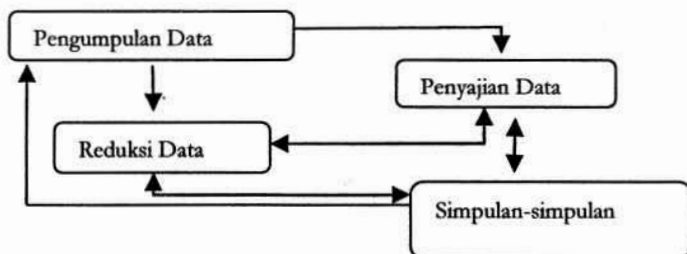
(Sutopo, 2006:76). Observasi dilakukan di lingkungan Lokalisasi Padang Bulan.

Ketiga, Dokumen. Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif (Sutopo, 2006: 80). Menurut Sugiyono (2005: 82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental sedangkan arsip pada umumnya berupa catatan-catatan yang lebih formal bila dibandingkan dengan dokumen. Dokumen dalam penelitian ini berupa penelitian terdahulu dan foto-foto. Dokumen dapat berupa arsip, dokumen resmi, dokumen pribadi, laporan, rekaman dan sebagainya (Moleong, 2001: 113). Dalam melakukan teknik pencatatan dokumen (*conten analysis*) bahwa peneliti bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi mengkaji makna yang tersirat.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, artinya penarikan simpulan yang bersifat umum dibangun dari data-data yang diperoleh di lapangan. Menurut Sutopo (2006) bahwa dalam prosesnya, analisis penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga macam kegiatan, yakni (1) analisis dilakukan bersamaan dengan

proses pengumpulan data, (2) analisis digunakan dalam bentuk interaktif, sehingga perlu adanya perbandingan dari berbagai sumber data untuk memahami persamaan dan perbedaannya, dan (3) analisis bersifat siklus, artinya proses penelitian dapat dilakukan secara berulang sampai dibangun suatu simpulan yang dianggap mantap. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus (Miles dan Huberman, 1992: 20).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif. Teknik analisis interaktif ini memiliki tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan secara bersamaan (Miles dan Huberman, 1992: 16). Ketiga alur dalam analisis data kualitatif apabila digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Komponen-komponen analisis data model interaktif

(Miles dan Huberman 1992: 16)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah data terkumpul dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dilakukanlah reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini adalah terdiri atas beberapa langkah, yaitu (1) menajamkan analisis, (2) menggolongkan atau mengkategorisasikan, (3) mengarahkan, (4) membuang yang tidak perlu dan (5) mengorganisasikan data sehingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 1992: 16-17).

Setelah reduksi data, langkah berikutnya dalam analisis interaktif adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif yang merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mampu menyajikan permasalahan dengan fleksibel, tidak "kering", dan kaya data. Namun Demikian, pada penelitian ini data tidak hanya disajikan secara naratif, tetapi juga melalui berbagai matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data dalam

penelitian kualitatif dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi. Dengan demikian, peneliti lebih mudah dalam menarik simpulan (Miles dan Huberman, 1992: 18).

Setelah reduksi data adalah menarik simpulan dan verifikasi. Langkah awal dalam penarikan simpulan dan verifikasi dimulai dari penarikan simpulan sementara. Penarikan simpulan hasil penelitian diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui teori yang dikembangkan. Dari hasil temuan ini kemudian dilakukan penarikan simpulan teoritik (Miles dan Huberman, 1992: 20). Kemudian simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau simpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya. Namun demikian, jika simpulan masih belum mantap, maka peneliti dapat melakukan proses pengambilan data dan verifikasi, sebagai landasan penarikan simpulan akhir.

BAB IV

PEMBAHASAN

Manusia sebagai makhluk biologis dan sosial adalah sebagai pelaku sejarah yang dalam perkembangannya sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya di mana manusia itu berada. Lingkungan dalam hal ini berkaitan erat dengan sekitar terjadinya keadaan geografis, kependudukan (jumlah mata pencaharian dan pendidikan) dan kehidupan sosial budaya yang ikut mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya sejarah budaya masyarakat dan keberadaan geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap kondisi daerah tersebut, baik kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi budayanya, terutama terhadap ciri masyarakat tersebut (Miskawi, 2007).

Prostitusi dianggap penyelewengan sosial dan hal yang merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Akan tetapi, saat ini keberadaan lokalisasi masih tetap eksis dan ramai pengunjung (konsumen) khususnya di kabupaten Banyuwangi

tepatnya di desa Benelan Kidul. Keberadaan dan eksisnya lokasi Padang Bulan juga didukung letak strategis kabupaten Banyuwangi yang terletak di ujung paling timur di pulau Jawa yang secara administratif sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Situbondo, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Maka, tidak salah jika Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat peristirahatan dan sekaligus lokasi dijadikan tempat persinggahan oleh para pengunjung. Pengunjungnya tidak hanya berasal dari lokal Banyuwangi, akan tetapi juga berasal dari beberapa kota di sekitar Banyuwangi, bahkan ada juga wisatawan asing yang menyempatkan diri untuk singgah di lokasi Padang Bulan.

Gambaran umum Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Kabupaten ini secara astronomis terletak di antara $7^{\circ}43'$ - $8^{\circ}46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}53'$ - $114^{\circ}38'$ Bujur Timur. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari sektor agraris. Bila diperhatikan menurut penggunaannya, luas Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 kilometer persegi, sebagian besar masih merupakan

daerah kawasan hutan. Bahkan kawasan hutan ini mencapai 193.684 ha, dan dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman dengan luas sekitar 28.971,59 ha. Sedangkan sisanya dipergunakan sebagai ladang dan jalan. Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 24 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah 1) Pesanggaran, 2) Bangorejo, 3) Purwoharjo, 4) Tegaldlimo, 5) Muncar, 6) Cluring, 7) Gambiran, 8) Glenmore, 9) Kalibaru, 10) Genteng, 11) Srono, 12) Rogojampi, 13) Kabat, 14) Singojuruh, 15) Sempu, 16) Songgon, 17) Glagah, 18) Banyuwangi, 19) Giri, 20) Kalipura, 21) Wongsorejo, 22) Licin, 23) Cluring, dan 24) Siliragung.

Kabupaten Banyuwangi dikenal dengan komunitas Using atau dikenal sebagai *wong* Using oleh beberapa kalangan dan hasil penelitian karena dianggap sebagai penduduk asli Banyuwangi, sebuah wilayah yang dulunya dikenal sebagai Blambangan. Komunitas ini menyebar di desa-desa pertanian subur di bagian tengah dan timur mulai Giri, Kabat, Glagah, Rogojampi, Singojuruh, Songgon, Cluring, Banyuwangi Kota, Genteng dan Srono. Di tiga kecamatan terakhir, mereka telah bercampur dengan penduduk nonUsing, yakni migran yang berasal dari bagian barat Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk Yogyakarta. Sehingga

komunitas Using di tiga kecamatan tersebut tak lagi dominan, terlebih lagi di kecamatan Kalibaru, Glenmore, dan Wongsorejo yang sebagian besar adalah beretnis Madura.

Gambaran umum hasil penelitian di desa Benelan Kidul akan dideskripsikan sebagai berikut:

Lokalisasi Padang bulan terletak di Desa Benelan Kidul terletak di Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Desa Benelan Kidul terdiri dari enam dusun yaitu Dusun cawang, Dusun Gambol, Dusun Suko, Dusun Tabanan, Dusun Padang Bulan dan Dusun Gebang. Jarak Desa benelan Kidul dari kota Kabupaten Banyuwangi kurang lebih 17 Km, jarak ke Ibu Kota Propinsi 228 Km, jarak ke Kecamatan Singojuruh 3 Km (data Monografi Desa Benelan Kidul, 2009).

Berdasarkan gambaran dari jarak kota Banyuwangi ke Desa Benelan Kidul 17 kilometer, dengan jarak tempuh bisa 1 jam, bisa dikatakan sangat dekat. Namun jarak dari desa ke tempat lokalisasi (Dusun Padang Bulan) diperkirakan 3 kilometer, sehingga keberadaan lokalisasi Padang Bulan di Desa Benelan Kidul ini berada di sekitar daerah yang jauh dari keramaian kota. Namun

demikian lokalisasi juga berada di daerah strategis yang sangat mudah di jangkau oleh akses publik karena lokasinya berada sekitar 17 Km dari pusat kota Banyuwangi. Selain itu, lokalisasi tersebut sangat mudah dijangkau transportasi umum yang siap melayani 24 jam.

Secara administratif, batas wilayah Desa Benelan Kidul dari sebelah utara berbatasan dengan Desa Lemahbang Kulon, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedaleman, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aliyan dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Alasmalang.

Luas wilayah Desa Benelan Kidul 414.785 ha. Tersebar dalam enam dusun. Dilihat dari kesuburan tanah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sangat subur 227 ha, subur 78 ha dan sedang 52 ha serta sektor pertanian yang banyak adalah pertanian padi. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika penghasilan terbesar penduduk dari hasil bercocok tanam. Masyarakat yang tidak bekerja di lahan pertanian, bekerja di berbagai sector misalnya buruh tani, pedagang, pegawai ataupun wiraswasta yang lainnya. Akan tetapi dengan perbedaaan yang ada di desa tidak mengubah sikap dari anggota masyarakat untuk tetap hidup dan saling menghormati, saling gotong-royong dan saling

menghargai (wawancara dengan Bapak Margono ketua RT, 17 juli 2009).

Desa Benelan Kidul terbagi menjadi enam dusun. Jumlah dari keseluruhan Desa Benelan Kidul sebanyak 4491 jiwa (1365 KK) yang terdiri dari 2296 jiwa laki-laki dan 2195 jiwa perempuan. Adapun rinciannya selengkapnya dapat dilihat tabel 5.1, berikut ini:

No	Golongan umur	Jenis kelamin		Jumlah penduduk
		L	P	
1	0 - 12 bulan	78	74	152
2	13 bulan-4 tahun	132	115	247
3	5 tahun-6 tahun	109	104	113
4	7 tahun-12 tahun	334	310	664
5	13 tahun-15 tahun	196	170	366
6	16 tahun-18 tahun	206	186	392
7	19 tahun-25 tahun	203	173	276
8	26 tahun-35 tahun	209	193	402
9	36 tahun-45 tahun	235	221	456
10	46 tahun-50 tahun	155	220	375
11	51 tahun-60 tahun	301	285	586
12	61 tahun-75 tahun	79	81	160
13	-> 75 tahun	59	63	122
Jumlah		2296	2195	4491

Sumber monografi Desa Benelan Kidul, 2009

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Per-Dusun Tahun 2009

No	Nama Dusun	Jumlah		Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	
1	Cawang	515	468	292
2	Gambol	476	462	271
3	Suko	295	293	191
4	Tabanan	353	239	135
5	Padang bulan	123	219	145
6	Gebang	542	518	331
Jumlah		296	2195	1365

Sumber monografi Desa Benelan Kidul, 2009

Berdasarkan dua tabel diatas, dapat dilihat dusun yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Dusun Padang Bulan sebanyak 342 jiwa dengan 145 KK. Berdasarkan gambaran ini bisa dikatakan bahwa Padang Bulan adalah daerah sepi dari penduduk. Sepinya dari keramaian penduduk sangatlah cocok dijadikan tempat lokalisasi dengan pertimbangan tidak mempengaruhi masyarakat sekitarnya.

Dilihat dari mata pencaharian penduduk desa Benelan Kidul, dapat dilihat pada table 5.3 berikut ini:

Table 5.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Benelan Kidul Tahun 2009

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	15	6	21
2	TNI	7	-	7
3	POLRI	4	-	4
4	Petani	79	27	106
5	Buruh Tani	535	296	830
6	Pedagang	21	11	33
7	Wiraswasta	58	19	33
8	Pegawai Swasta	37	14	51
9	Bidan	-	1	1
10	Tukang kayu	34	-	34
11	Tukang bata	38	-	38
12	Montir	5	-	5
13	Sopir	31	-	31
14	Pensiunan	12	4	16

Sumber: Monografi Desa Benelan Kidul, 2009.

Berdasarkan tabel mengenai mata pencaharian penduduk yang paling besar adalah

buruh tani dengan jumlah 830 jiwa dan petani 106 jiwa. Dilihat dari jenis pekerjaan yang paling banyak ini termasuk golongan masyarakat yang paling bawah jika dibandingkan penduduk yang bermata pencaharian sebagai PNS, TNI, polisi (bertugas dipemerintahan) dengan pertimbangan khususnya para buruh tani yang tidak memiliki lahannya sendiri jika dilihat dari penghasilannya adalah Rp. 10.000 sampai 15.000 per hari.

Bagi masyarakat penghasilan tersebut sangatlah minim, sehingga banyak masyarakat mencari pekerjaan sampingan seperti tukang ojek dan pembantu rumah tangga (tukang cuci dan bersih-bersih rumah). Profesi mata pencaharian sebagai ojek, dagang, dan pembantu rumah tangga banyak ditemukan disekitar kompleks Lokalisasi Padang Bulan (hasil wawancara dengan Bapak Samsul, 11 oktober 2009)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa eksistensi keberadaan lokalisasi dapat memberikan pengaruh sosial ekonomi masyarakat di luar lingkungan lokalisasi, sehingga tidak salah jika masyarakat sekitar lebih memilih diam (tidak menolak keberadaan lokalisasi) karena di sini tampak ada dua komponen yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan desa Benelan Kidul, dapat dilihat pada table 5.4 berikut ini:

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	jumlah
1	Tidak sekolah	192	184	378
2	SD (sekolah dasar)	374	385	759
3	SLTP	149	117	266
4	SLTA	91	59	150
5	Akademi	-	-	-
6	PT/SI	-	-	-
7	S2-S3	-	-	-

Sumber: Monografi Desa Benelan Kidul, 2009.

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Benelan Kidul termasuk kurang maju dibandingkan wilayah lain yang ada di kecamatan Singojuruh, karena masih banyak ditemui penduduk yang belum lancar membaca, menulis maupun berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahkan ada yang sama sekali buta huruf.

Banyaknya jumlah penduduk yang buta aksara, tidak tamat sekolah dasar (SD) maupun hanya mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: perekonomian dan pernikahan usia dini. Mata pencaharian yang mengalami pasang surut menyebabkan anak-anak lebih membantu orang tua bekerja ketimbang sekolah dan faktor pernikahan dini ini juga ikut ambil bagian karena faktor pendidikan rendah. Banyak gadis yang seharusnya masih menikmati masa remajanya, terpaksa harus hidup berumahtangga. Selain itu juga tingkat kesadaran yang masih rendah untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena ada anggapan bahwa cukup dengan bisa membaca dan menulis sudah merupakan kemajuan dibandingkan dengan mereka yang buta huruf. Rendahnya tingkat pendidikan ini sangatlah berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat Benelan Kidul pada umumnya dan masyarakat Dusun Padang Bulan pada khususnya tentang eksistensi keberadaan lokasi Padang Bulan.

Bagi masyarakat pemimpin itu yakni pemimpin religi ataupun pemimpin di pemerintahan. Pemimpin religi kebanyakan dipimpin oleh kyai dan pemimpin pemerintahan

diwakili oleh kepala desa. Pemimpin religi kebanyakan dipimpin oleh para kyai karena 90% dari penduduk desa Benelan Kidul memeluk agama Islam (Monografi desa Benelan Kidul, 2009). Peran kyai sangat menentukan kebijakan lokal disamping tidak melupakan peran dari pemerintahan atau perangkat desa dan sesepuh desa, akan tetapi kebanyakan penduduk desa Benelan Kidul menaruh hormat kepada kyai dan pemimpin langsung.

Penduduk Singojuruh mempunyai dua etnis yang berbeda yaitu etnis Jawa dan etnis Madura. Namun perbedaan tersebut tidak membuat mereka saling membenci ataupun menjauhi, akan tetapi mereka hidup rukun dan damai (wawancara dengan bapak Sutoyo, 2 juni 2009). Hal ini karena adanya pranata-pranata sosial yang berfungsi sebagai unit dalam sistem kebudayaan, mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai tradisi tertulis dan lisan. Dengan demikian tercipta masyarakat yang mempunyai respon kuat terhadap gejala sosial dan didukung oleh masyarakat yang religius (Harsojo, 1986: 153).

Adapun pranata mempunyai pengertian kelakuan berpola yang seluruh total dari kelakuan manusia yang berpola tentu. Hal ini bisa diperinci menurut

fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dalam masyarakat. Pranata kebudayaan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan memakai kebutuhan hidup manusia, dan prostitusi juga merupakan pranata sosial (Kontjaraningrat, 1994:16). Akan tetapi, pranata tersebut tidak mendapatkan tempat karena prostitusi adalah hal yang merusak sendi-sendi kehidupan manusia, sehingga masyarakat Desa Benelan Kidul dalam melihat prostitusi di Lokalisasi Padang Bulan ada yang bersikap menolak, menerima dan acuh tak acuh.

Lokalisasi Padang Bulan di huni oleh para PSK yang berasal dari berbagai daerah Jawa Timur. Bahkan ada beberapa PSK yang berasal dari luar Jawa (Madura, Bali, Solo dan Kalimantan). Umumnya motif ekonomi menjadi hal yang melatarbelakangi mereka sebagai PSK. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lokalisasi memainkan peran penting dalam bidang ekonomi bagi keluarga para PSK. Namun demikian, peran ekonomi yang dimainkan oleh para PSK bagi keluarga sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya.

4.1 Sejarah Lokalisasi Padang Bulan

Adanya permasalahan tentunya ada alasan yang menyebabkan permasalahan itu timbul. Demikian juga berdirinya lokalisasi pada suatu tempat atau daerah tentunya ada alasan tertentu. Alasan tertentu itu menimbulkan pertimbangan-pertimbangan baik dari kepentingan pemerintah setempat ataupun dari masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut pemerintah daerah setempat mendirikan sebuah lokalisasi yang digunakan untuk PSK beroperasi dan jika mungkin merehabilitasi para PSK dan muncikari. Selain itu mereka juga diperbolehkan melakukan transaksi seks. Hal ini sudah menjadi kenyataan bahwa hampir seluruh kota di Pulau Jawa terutama di kota-kota pelabuhan, terdapat tempat pelacuran yang memang dilokalisir oleh pemerintah daerah setempat misalnya di Jakarta, Surabaya, Semarang, Banyuwangi, Solo 1960 dan Jember 1972 (Asmosiono,1974).

Perkembangan kota membawa dampak yang positif bagi kehidupan manusia yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan kota juga berpengaruh negatif terhadap adanya kenakalan remaja, kriminalitas, kemiskinan dan

berbagai kepincangan sosial disamping masalah-masalah fisik seperti kecelakaan lalu lintas, masalah perumahan dan sebagainya (Ulman, 1983). Kepincangan sosial salah satunya adalah masalah penyakit sosial diantaranya yang disebut dengan prostitusi atau pelacuran.

Masalah prostitusi atau pelacuran adalah masalah yang paling tua di bumi, masalah lama tapi terasa paling baru untuk dibicarakan dan dibahas. Untuk menentukan secara pasti kapan munculnya prostitusi atau pelacuran sangatlah sulit. Dapat dikatakan bahwa sejak adanya norma perkawinan, muncul prostitusi. Adanya prostitusi adalah salah satu hal yang dikatakan menyimpang dalam norma perkawinan dalam suatu masyarakat.

Asal-usul prostitusi modern di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa-masa kerajaan Jawa. Perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Kerajaan terbesar pada masa Islam adalah Mataram yang terletak di sebelah selatan Jawa Tengah, kekuasaan raja pada saat itu sangat besar, mereka seringkali dianggap menguasai segalanya, tidak hanya tanah, harta benda, tetapi juga nyawa hamba sahaya. Anggapan ini jika dikaitkan dengan eksistensi perempuan sat

itu mempunyai arti penting sendiri (Sulistyaningsing, dkk. (1997). Perempuan dalam hal ini dijadikan sebagai simbol kekayaan dan sebagai sumber eksploitasi, sehingga kebanyakan raja-raja di Jawa kebanyakan mempunyai selir atau istri simpanan. Akibat dari kejadian tersebut maka banyak masyarakat yang meniru kehidupan dari pemimpin untuk memanfaatkan wanita sebagai sumber kehidupan.

Prostitusi terus berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat peraturan pertama kali diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda tentang masalah prostitusi. Pemerintah Hindia Belanda mentolerir praktek-praktek prostitusi, yang dalam peraturan ini, wanita-wanita diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seminggu sekali, jika di antara mereka ditemui terjangkit kelamin, mereka harus dibawa ke rumah sakit dan setelah sembuh mereka diizinkan pulang (Margana,1994).

Masalah prostitusi yang selalu ada dari waktu ke waktu dirasa sangat mengganggu di dalam kehidupan manusia. Pelarangan prostitusi sebetulnya sudah termuat dalam hukum Indonesia baik itu peraturan daerah atau dalam peraturan KUHP. Akan tetapi peraturan di KUHP hanya

memuat beberapa pasal yang dikenakan kepada seseorang yang menghubungkan untuk berbuat cabul atau para muncikari. Peraturan prostitusi dalam hukum pidana belum dijelaskan secara rinci dan belum bisa menjerat para penjaja seks atau pengguna jasa seks.

Pada masa kini prostitusi terus berkembang seiring dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam penanganan prostitusi lebih dipengaruhi oleh pertimbangan kesehatan, keamanan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sampai sekarang ini di Indonesia belum ada undang-undang yang melarang untuk menjual jasa seks atau melakukan aktifitas yang sejenis. Hukum pidana hanya melarang bagi mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks seks secara illegal seperti yang tertera dalam KUHP pasal 296, 297, 506 yang didalamnya melarang perdagangan wanita dan anak-anak dibawah umur (R. Soesilo, 1989). Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks Indonesia, karena larangan dalam memberikan pelayanan seksual secara komersial sudah ada di dalam hukum negara. Dalam peraturan prostitusi ini cenderung diatur dalam

peraturan daerah, dengan mempertimbangkan aksi dan reaksi masyarakat setempat ataupun dari organisasi masyarakat baik yang sifatnya mendukung ataupun menentang. Lokalisasi modern yang dibangun pada awal tahun 1960 merupakan salah satu bagian dari disiplin sosial dan pengendalian. Kompleks lokalisasi itu resmi dibawah pengawasan Dinas Sosial dan pemerintah daerah setempat.

Eksistensi lokalisasi PSK Padang Bulan dirintis dari tahun 1974. Perintisan tersebut pada mulanya tidak dengan sengaja akan mendirikan tempat mangkalnya wanita PSK. Pada awalnya perintis tersebut --yang sampai sekarang diketahui namanya Mak Upin, semata-mata bertujuan mendirikan warung makan dan minum pada tahun 1970 sebagai usaha di sektor informal dengan harapan agar ekonomi keluarganya bisa lebih baik. Perkembangan usaha warung Mak Upin ternyata mengalami kemajuan sehingga dia membutuhkan pembantu warung seorang perempuan muda. Pembantu Mak Upin yang masih relatif muda yang dikatakan masih berusia sekitar dua puluh lima tahun tersebut, dan juga statusnya yang janda membuat laki-laki "hidung belang" berminat menggodanya untuk diajak "kencan". Ternyata

pembantu Mak Upin bersedia dan mendapat ijin dari Mak Upin dengan syarat Mak Upin diberi "jatah" dari penghasilan melayani setiap laki-laki di warungnya. Dari kondisi tersebut pembantu Mak Upin sejak saat itu bisa disimpulkan berprofesi ganda yaitu sebagai pembantu warung Mak Upin dan menjadi PSK. Seiring perjalanan waktu berita tentang warung Mak Upin yang ternyata menyediakan PSK tersebar dari mulut ke mulut. Maka dari itu beberapa PSK dan laki-laki hidung belang semakin sering datang dan singgah di warung Mak Upin.

Keberadaan PSK sampai pada tahun 1974 masih belum terlokalisasi. Para PSK masih nampak berkeliaran di sekitar pinggir jalan Dusun Padang Bulan tepatnya 500 meter sebelah barat dari tempat lokalisasi PSK saat ini. Pengemasan tempat mangkal para PSK masih tradisional. Maksudnya para PSK mangkal di warung-warung kecil (warung nasi dan kopi) seperti warung milik Mak Upin yang berdiri sekitar tahun 1970an. Sampai tahun 1974 ada sekitar tiga warung yang berdiri di sekitar Padang Bulang mengikuti jejaknya Mak Upin. Setiap warung kopi dihuni oleh 2-3 PSK. Seiring banyaknya permintaan dan kebutuhan para laki-laki hidung belang ikut mendorong dan

melatarbelakangi bertambahnya para PSK. Dari sinilah keberadaan PSK di Padang Bulan bertambah banyak jumlahnya dan berkeliaran di sepanjang jalan desa.

Keberadaan PSK yang demikian menimbulkan pandangan kurang positif dari lingkungan masyarakat sekitarnya, karena tambah berkeliaran dengan bertambahnya jumlah PSK. Oleh karena itu pemerintah yang dimotori oleh pemerintah desa setempat melembagakan pelacuran tersebut. Tujuannya agar segala bentuk pelacuran dan segala konsekuensinya dapat lebih mudah diawasi serta diatur secara lebih baik.

Upaya melembagakan pelacuran sebenarnya bukan hal baru. Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa pada tahun 1852 pada zaman kolonial Hindia Belanda keluar peraturan yang melembagakan pelacuran agar dapat diawasi dan diatur secara lebih baik, lagi pula apabila dijalankan pelarangan akan terjadi pelacuran gelap, ini akan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit kelamin yang tidak dapat diawasi baik penyebaran maupun pengobatannya.

Pada garis besarnya dalam mengatasi para prostitusi ini dapat dibedakan menjadi dua

langkah. Pertama usaha yang bersifat preventif, yang meliputi penyempurnaan undang-undang, menciptakan lapangan pekerjaan, penyelenggaraan pendidikan seks, intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan atau kerohanian. Kedua adalah tindakan yang bersifat represif dan kuratif yang meliputi, aktifitas rehabilitasi dan resosialisasi penyempurnaan tempat penampungan bagi para PSK, pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu yang tepat (Alam As, 1984).

Apabila prostitusi semakin ditekan maka mengakibatkan bertumbuhnya prostitusi versi baru yang semakin semarak dan berkeliaran seperti yang berada di gang-gang kecil, pemukiman, hotel, pusat keramaian kota yang pada akhirnya nanti berimbas pada ketertiban dan kesehatan.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut maka akhirnya Pemkab Banyuwangi melegalkan lokalisasi. Dengan demikian harapannya lebih mudah dalam menangani pelacuran dan pengawasan yang intensif dalam praktek-praktek yang dilakukan oleh PSK dan para muncikari, serta akan mempermudah dalam melakukan pendataan dan pemantauan kegiatan-kegiatan yang ada di lokalisasi tersebut. Walaupun secara resmi keberadaan Lokalisasi Padang Bulan tidak disertai

dengan surat keputusan bupati (SK Bupati) tetapi bukti adanya penyuluhan, sosialisasi HIV dan klinik sebagai bukti kongkrit bahwa Pemerintah Banyuwangi melegalkan Lokalisasi Padang Bulan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Abdillah selaku Ketua RW yang sudah menetap mulai tahun 1975, menyatakan, bahwa Bupati Samsul Hadi dan Bupati Ani Ratna Lestari pernah berkunjung untuk mensosialisasikan dan memberikan pembinaan serta mendirikan klinik kesehatan. Dengan demikian bisa disebut hal ini sebagai bukti kongkrit bahwa pemerintah daerah mendukung.

Demikian juga aktifitas pelacuran di sekitar daerah Padang Bulan pada mulanya dipandang sangat dekat dengan perumahan penduduk, dan dianggap liar maka perlu juga dilembagakan dan dilokalisir pada tempat atau lokasi khusus. Dengan alasan tersebut maka pada tahun 1984 para PSK yang berkeliaran diorganisasi supaya posisi mangkal mereka pindah ke pedalaman, yaitu 500 meter dari tempat semula, mendapat ijin dari pemerintah desa dan bahkan diresmikan oleh Muspida Banyuwangi (wawancara dengan Bapak Prengki, 28 Juni 2009). Pendapat tersebut juga ditambahkan oleh Bapak Samsul selaku sekretaris pengurus Lokalisasi Padang Bulan (wawancara,11

Oktober 2009), bahwa pindahnya lokalisasi dari yang semula dikemas dengan warung-warung kecil lalu dipindahkan ke arah timur sekitar 100 meter saat masa pemerintahan Camat Mukarrom dan Bupati Joko Supa'at Selamat dengan pertimbangan terlalu dekat dengan keramaian. Informasi pindahnya lokalisasi ke arah timur ini disebarluaskan melalui radiogram.

Salah satu dampak dari perpindahan lokalisasi mangkal tersebut adalah sebagian PSK ada yang pindah ke Lokalisasi Blibis, Desa Blimbingsari, Banyuwangi dan lokalisasi lainnya. Alasan perpindahan sebagian PSK dari Padang Bulan ke tempat lain karena menilai tempat mangkal yang baru di Padang Bulan tersebut kurang strategis dan belum terkenal sehingga sepi pengunjung.

Pembangunan perumahan atau wisma PSK mulai dilakukan pada tahun 1992. Para muncikari yang bermodal mulai membeli tanah dan mulai membangun wisma tetapi baru beroperasi secara penuh pada tahun 1994. Para PSK yang terlanjur menempati lokalisasi di Dusun Blibis Desa Blimbingsari dan lokalisasi yang lainnya sebagian ada yang kembali ke Lokalisasi Padang Bulan setelah menilai Lokalisasi Padang Bulan mulai

ramai pengunjung dan sebagian masih menetap di lokasi Blibis. Pada awal tahun 1994 lokasi Padang Bulan baru memiliki 10 wisma atau rumah yang dihuni oleh 10 Kepala keluarga yang terdiri dari mucikari dan PSK. Setiap wisma bisa menampung 3-7 PSK karena memiliki 3- 7 kamar yang berukuran rata-rata 3 x 2 meter, tetapi ada juga kamar yang berukuran 2 x 3 meter, ada juga yang agak luas yaitu berukuran 3 x 4 meter. Pada bulan Juli 2009, menurut Bapak Abdilah (Ketua RW di Lokasi Padangbulan), jumlah PSK mencapai 104 orang atau 80 KK. Jumlah dari setiap KK terdiri dari 3-4 orang PSK dan 1-2 orang tuan rumah (mucikari). Akan tetapi, pada tanggal 2 Agustus 2009 jumlah PSK menyusut menjadi 30 orang karena mereka mudik menjelang bulan puasa Ramadhan dan Lebaran. Abdillah menyatakan bahwa PSK masih menghormati bulan Ramadhan sebagai ibadah umat manusia khususnya muslim, sehingga lokasi ditutup sementara mulai tanggal 3 Agustus sampai 26 Agustus 2009 (wawancara tanggal 2 Agustus 2009).

Tarif setiap kali kengan dengan PSK memiliki harga standar yang ditentukan oleh ketua RT atas dasar aspirasi penghuni lokasi yang selalu disesuaikan dengan dinamika harga dalam

pemenuhan kebutuhan hidup. Ketika harga kebutuhan pokok naik maka harga pelayanan setiap PSK pun naik atau disesuaikan. Pada tahun 1970-1989 tarif PSK adalah antara Rp 2 ribu - Rp 5 ribu atau dalam hal ini tergantung kesepakatan harga antara PSK dan Laki-laki pelanggannya. Pada tahun 1990-1997 setiap pelayanan PSK ada kenaikan antara 10 ribu rupiah sampai dengan 20 ribu rupiah. Pada tahun 1998-2000 setiap transaksi dengan PSK berkisar antara 20 ribu sampai dengan 30 ribu rupiah. Pada tahun 2000 sampai dengan sekarang untuk lokalisasi di Banyuwangi selain di Padang Bulan adalah Rp 30 ribu - Rp 50 ribu. Namun untuk di lokalisasi Padang Bulan setiap transaksi dengan PSK berkisar antara Rp 80 ribu - Rp 100 ribu. Bahkan ditemukan dalam penelitian ini ada dua orang PSK mematok harga Rp 150 ribu.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tarif atau harga PSK di Padang Bulan relatif lebih mahal dibandingkan dengan lokalisasi lainnya di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan fasilitas yaitu prasarana dan sarana "kencan" sangat memadai, rapi, bersih, dibandingkan dengan lokalisasi lainnya di Kabupaten Banyuwangi. Faktor lainnya yang menjadikan mahal nya tariff PSK di Padang Bulan adalah dari sisi usia para pekerja

banyak yang berusia muda, berkulit bersih dan berparas cantik. Adanya jaminan kesehatan dari instansi terkait melalui pemeriksaan kesehatan secara periodik juga menjadi salah satu pertimbangan. Lokalisasi Padang bulan juga telah mendapatkan bantuan peralatan kesehatan dari WHO. Setiap hari Minggu pagi selalu diadakan senam kesegaran jasmani untuk menjaga kesehatan para PSK. Yang menarik yaitu pada saat penelitian ditemukan 2 orang PSK yang masih berusia 19 tahun dan bisa dikatakan mirip artis sinetron.



Suasana Lokalisasi Padang Bulan

Perilaku para PSK sering berpindah-pindah tempat dari lokalisasi yang satu ke lokalisasi yang lainnya. Oleh karena itu jarang sekali ditemukan PSK yang menetap di Padang Bulan lebih dari satu tahun. Mengenai hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Tina, PSK asal Surabaya dan baru satu bulan tinggal di Padang Bulan:

“ Terus terang Mas, saya ini tidak pernah lama tinggal di satu lokalisasi, kalau saya paling lama tiga bulan. Saya biasanya lebih dari waktu itu pindah-pindah supaya dikira orang baru terus oleh pelanggan lokalisasi. Selain itu orang tidak gampang mengenali saya.”(hasil wawancara, 28 juni 2009).

Berdasarkan pernyataan Tina tersebut dapat diketahui bahwa alasan mereka berpindah-pindah tempat antara lain adalah agar mereka tidak mudah dideteksi oleh saudara, teman atau kenalan yang tidak suka dengan profesi mereka. Agar profesi mereka sebagai wanita PSK tetap menjadi rahasia bagi sebagian kerabat dan teman-temannya. Selain itu perpindahan mereka juga terkait dengan nilai jual para PSK. Ada kecenderungan para laki-laki atau para pelanggan menyukai para PSK yang baru dan kurang suka dengan PSK yang lama, maka dengan berpindah tempat dari satu lokalisasi ke lokalisasi lainnya maka para PSK akan tampak selalu baru di lokalisasi tersebut.

Pengetahuan PSK pada resiko terhadap kesehatannya, misalnya, rentan terkena penyakit menular seksual, relatif rendah. Pengetahuan tersebut sangat berkaitan dengan perilakunya untuk mencegah agar tidak tertular penyakit tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rofi yang mengaku baru dua bulan tinggal di lokalisasi PSK Padang Bulan sebagai berikut.

“Saya memang pernah dengar ada penyakit spilis, HIV – Aids tapi terus terang saya kurang paham Mas tentang penyakit itu. Saya juga tidak tahu bagaimana mencegahnya.” Ketika peneliti menyarankan agar PSK memakai kondom maka Tina teman dekatnya Rofi menjawab: *“Wah pelanggan saya jarang mau memakai kondom ya Mas, repot ya posisi saya....gak mungkin saya menolak keinginan pelanggan, malah bisa jadi dia gak mau lagi pada saya, maka saya yang rugi. Saya juga gak mau rugi lho Mas.”* (hasil wawancara, 28 juni 2009).

Oleh karena itu disarankan kepada pihak terkait untuk melakukan penyuluhan – penyuluhan atau penyebaran informasi dan pembinaan kesehatan secara intensif, secara langsung maupun tidak langsung melalui media masa elektronik ataupun cetak kepada para PSK khususnya tentang pencegahan penyakit menular seksual.

Pemilik tanah yang dijadikan tempat Lokalisasi Padang Bulan pada awalnya adalah

Bapak Mukib dan Ibu Bukani (suami istri) dengan luas tanah yang dimiliki 1 hektar. Tanah tersebut dikapling menjadi ukuran 8x10 meter untuk dijual kepada para muncikari dan dibangun rumah untuk PSK.

Perjalanan PSK mengalami dinamika, tidak selalu mulus, mengalami pro dan kontra, tidak sedikit pihak yang menghendaki agar lokalisasi ditutup. Pihak yang menghendaki lokalisasi ditutup terutama dari kalangan kaum ulama. Pada tahun 2006 saat bupati Banyuwangi dijabat oleh Ratna Ani Lestari pernah juga menghendaki penutupan lokalisasi (hasil wawancara dengan Bapak Frengki, 2009). Pihak pengelola lokalisasi tentu tidak tinggal diam. Pada prinsipnya para muncikari bersedia lokalisasi ditutup asal ada jalan keluarnya terutama nasib para PSK dan muncikari dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa faktor dominan mereka menjadi atau menekuni profesi PSK adalah karena faktor ekonomi. Selama penutupan lokalisasi tidak dibarengi dengan solusi atau pemecahan masalah ekonomi PSK, maka dengan tegas para pihak yang terkait dengan PSK menolak penutupan lokalisasi. Oleh karena pihak pemerintah dan masyarakat juga ulama yang menentang lokalisasi tidak mampu memberikan

solusi kongkrit dari masalah akibat penutupan lokalisasi maka sampai sekarang lokalisasi tersebut diberi toleransi untuk tetap eksis. Jadi Usaha penutupan lokalisasi bukan hanya sekedar kebijakan yang berpedoman pada teori bahwa keberadaan PSK sebagai penyakit masyarakat dan dipandang negatif tetapi di lain pihak kebijakan tersebut mestinya diiringi dengan adanya pembinaan dan memberikan wadah kesempatan kerja agar terlepas dari ketidak berdayaan ekonomi dan lembah hitam lokalisasi. Jika langkah kongkrit pengentasan PSK tersebut berhasil maka hal tersebut merupakan wujud nyata penghargaan pemerintah terhadap pemberdayaan PSK. Dengan sendirinya keberadaan mereka bisa dihilangkan dari masyarakat. Akan tetapi selama adanya permintaan dari konsumen, dalam hal ini lelaki hidung belang, serta kurangnya perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan ke arah perbaikan nasib, maka keberadaan PSK di luar dan di dalam lokalisasi akan tetap eksis.

PSK yang berada di lokalisasi Padang Bulan secara tidak langsung telah melalui proses seleksi. Tidak sembarangan perempuan bisa masuk dan menjadi PSK di Lokalisasi Padang Bulan, tetapi harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh

pengurus lokalisasi yang diketuai oleh RT setempat. Terdapat beberapa aturan yang mengikat dan harus ditaati oleh calon penghuni lokalisasi yakni harus mendapat persetujuan dari suami bagi yang sudah berkeluarga dan bagi yang belum berkeluarga mendapatkan persetujuan dari orang tua atau saudaranya. Peraturan semacam ini sudah berlangsung sejak tahun 1994. Dengan demikian wajar jika keberadaan PSK di Padang Bulan lebih tertib jika dibandingkan dengan lokalisasi liar lainnya di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai bukti persetujuan itu dibuktikan dengan surat tertulis dari pihak keluarga dan untuk memperkuat fakta keberadaan PSK maka langkah yang dilakukan oleh ketua RT dan RW melakukan observasi langsung tentang keberadaan PSK. Alasan tertibnya administrasi ini tidak lain untuk menjaga eksistensi ketertiban yang berdasarkan peraturan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang perempuan memilih menjadi PSK yakni ekonomi keluarga, lingkungan dan kebutuhan biologis. Beberapa faktor tersebut juga menjadi faktor pendorong sejarah keberadaan di Lokalisasi Padang Bulan.

Lokalisasi Padang Bulan banyak dihuni dari berbagai wilayah antara lain dari kabupaten

Jember, Surabaya, Malang, Probolinggo, Madura, Solo, Situbondo, Bondowoso, Bali. Interpretasi banyaknya penghuni lokalisasi Padang Bulan yang pada saat ini ditemukan relatif banyak dari PSK Puger Kabupaten Jember, diduga ada hubungannya dengan penutupan lokalisasi Puger pada tahun 2007. Menurut Bapak Frengki (Wawancara 29 Mei 2009) bahwa jumlah PSK mengalami naik turun tiap bulannya.

4.2 Stigma Negatif Masyarakat terhadap Keberadaan PSK Padang Bulan

Pertimbangan masyarakat sekitar menolak kehadiran pelacuran tidak lain mengacu pada pranata atau norma agama. Berikut pernyataan tokoh agama yang tidak mau disebutkan namanya,

“melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa melalui proses pernikahan secara agama maka dianggap zina. Apalagi pelacur yang tiap hari melakukan hubungan itu tanpa melalui proses pernikahan sudah jelas itu zina, manusia kotor dan tempatnya di neraka jahanam dan termasuk laki-lakinya” (Wawancara, 21 Juni 2011).

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan aturan agama. Pelacuran dianggap sebagai perilaku kotor.

Neraka dan surga dijadikan simbol- simbol agama untuk dasar mereka. Surga hanya diperuntukkan bagi orang yang menjalankan sesuai aturan agama. Dalam hal ini, perilaku yang dianggap baik oleh wanita pelacur tetap mendapat stigma sebagai manusia kotor.

Berikut salah satu pernyataan tokoh masyarakat tentang pelacuran di Lokalisasi Padang Bulan.

"Pelacur itu kan sebenarnya sampah masyarakat, ya keberadaannya harus ditutup, jika tidak akan merusak moral masyarakat. Dan orang seperti itu tidak bisa di kasihani, saya kira dia sudah tahu kalo tempat itu kotor dan sangat ditentang oleh agama sebagai tempat perzinahan. Tidak ada alasan apa yang menyebabkan masuk ke lokalisasi yang jelas mereka sudah melakukan pekerjaan kotor dan zina itu sudah bertentangan dengan agama" (wawancara, 21 Juni 2011).

Berdasarkan stigma yang dibangun masyarakat, merupakan suatu hal yang wajar karena standar penilaian di dasarkan pada norma-norma agama dan pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat. Stigma masyarakat sampai dengan sekarang dipandang sangat buruk, hina dan menjadi sampah bahkan musuh masyarakat. PSK itu juga bisa diartikan sebagai salah satu tingkah, asusila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacuran itu adalah

perempuan yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan *mala* atau celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.

Kajian atas tafsiran stigma negatif keberadaan pelacuran sebagai salah satu profesi yang dinilai oleh masyarakat sebagai profesi yang nista dan kotor adalah pelacuran. Pelaku darinya dianggap tak bermoral dan sampah masyarakat. Masyarakat, pada umumnya, menganggap bahwa dalam diri pelacur tidak terlintas sedikitpun nilai positif, meskipun dari keberadaan mereka tidak sedikit masyarakat yang diuntungkan secara ekonomi, seperti tukang parkir, tukang becak, warung makan dan bahkan disinyalir telah memberikan masukan pada APBD kota atau daerah dimana mereka beroperasi.

Konstruksi stigma minor terhadap pelacur ini sebenarnya terbentuk karena masyarakat dalam memandang pelacur hanya dari satu aspek saja, yakni aspek profesi mereka yang terjawantahkan secara lahiriyah. Padahal, pelacur juga memiliki aspek lainnya, yakni aspek kemanusiaan. Sebagai manusia, pelacur tidak hanya butuh untuk memenuhi kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan sosial dan berintegrasi dengan lingkungannya.

Mereka juga membutuhkan kasih sayang, rasa pengertian dan bahkan rasa ketuhanan. Namun, karena aspek yang terakhir ini lepas dari pandangan masyarakat, maka sisi kemanusiaan mereka terabaikan dan hanya mendapat hukuman moral seperti hujatan, cibiran, dan bahkan diskriminasi dan marjinalisasi baik dalam sosial, politik maupun ekonomi.

Para pelacur bukanlah orang yang melacurkan diri. Mereka adalah orang yang dilacurkan atas nama desakan hidup dan kemudian diterkam oleh jebakan penipuan dan tidaklah semata-mata karena kepuasan biologis, namun, dari mayoritas pengakuan mereka, dikarenakan oleh himpitan ekonomi, ditipu atau dipaksa orang-orang yang tak bertanggungjawab.

Kehidupan pelacur yakni sisi 'luar' (panggung depan) yang nampak oleh mata bahwa mereka berprofesi sebagai penjaja seksualitas dan sisi 'dalam' (panggung belakang) yang hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh mereka sendiri. Banyak kesedihan yang mereka alami, tapi mereka tidak menampakkan kesedihan yang sebenarnya. Sebenarnya banyak tekanan-tekanan dalam Kehidupan PSK di lokalisasi yaitu selalu mendapatkan tekanan struktural dan kultural.

Secara kultural, para pelacur dikonstruksikan sebagai perempuan malam atau perempuan nakal yang menempati lembah hitam. Sebutan yang dilekatkan kepada mereka pun bervariasi: perempuan jalanan, lonte, sundal, pekerja keras, pelacur, atau *begenggek*.

Pelacuran adalah kelompok perempuan yang terbuang dari dunia terang, baik dan terhormat. Dalam banyak hal, mereka sesungguhnya adalah korban dari sebuah sistem sosial yang tidak ramah terhadapnya. Mereka adalah orang yang sedang berada di dalam kenyataan hidup yang sebenarnya mungkin tidak diharapkan.

Tekanan struktural tersebut pada umumnya datang dari kalangan internal seperti para germo (muncikari), aparat keamanan, dan orang-orang yang hidup dari profesinya, salah satunya keluarga yang termasuk ekonomi lemah yang menyebabkan adanya struktur sosial yang timpang.

Berdasarkan analisis marxian, disparitas pendapatan yang terlalu *njomplang* antara golongan kaya dan miskin atau antara majikan dan pekerja pada gilirannya akan melahirkan suatu

situasi alienasi. Tekanan struktural akan semakin kuat jika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat bapak sebagai kepala keluarga tidak lagi mampu menyangga ekonomi keluarga maka beban ekonomi keluarga jatuh pada ibu dan ketika ibu juga tidak mampu menyangga beban ekonomi maka anak-anak usia dewasa akan menjadi bagian dari tumpuan ekonomi keluarga lainnya. Ada beban ekonomi anak bagi keluarga miskin di dalam kehidupan masyarakat. Ketika beban tersebut tidak memperoleh penyaluran yang memadai. Maka, salah satu jalan keluar yang memadai adalah dengan menjadi seorang pelacur.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Rusmina (bukan nama sebenarnya), umur 27 tahun, menerangkan bahwa:

"Saya kira mas (peneliti) mengerti bagaimana susahnya mencari pekerjaan sekarang. Tapi persoalan utama bukan hanya itu sehingga saya bisa kerja disini. Saya jadi tulang punggung keluarga. Bapak dan ibu saya satu rumah dengan keluarga saya. Saya punya anak 2 dan suami. Suami tidak bisa bekerja setelah musibah kecelakaan. Saya bilangnyanya menjadi TKI karena tidak ada biaya saya harus disini. Namun sampai sekarang keluarga saya tahunya bekerja di luar negeri. Saya hanya tidak mau menjadi beban keluarga dan yang penting keluarga saya senang minimal mengurangi beban. Saya tahu memang menjadi PSK uangnya banyak tapi jika

tidak saya lakukan mas kan tau sendiri.” (wawancara, 4 Juni 2011).

Pendapat di atas juga didukung oleh Intan (nama samaran), umur 32 tahun:

“Saya hanya tidak mau jadi beban keluarga mas, selama saya ditinggal suami dan tidak tau kemana saya diberikan beban tanggungan hutang. Siapa lagi yang bertanggungjawab kalau bukan keluarga saya. Kalau sedikit tidak masalah, saya malu sama orang tua dan tetangga. Kerja diluar negeri saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa saya hanya lulusan SD” (wawancara, 4 Juni 2011).

Berdasarkan pendapat di atas, menjadi pelacur bukan sebuah pilihan dari kebanyakan dan tidak mungkin mempunyai cita-cita menjadi seorang pelacur. Tuntutan yang terlalu berat untuk diterimanya dan menjadi pelacur tidak menuntut untuk mempunyai keterampilan tinggi, tetapi menjanjikan upah yang memadai. Struktur sosial yang timpang dan rendahnya pendidikan akan mendorong semakin banyaknya para pelacur baru yang bermunculan dan bisa melahirkan pasar-pasar seks.

Selain tuntutan keluarga, tekanan struktural dari germo (muncikari) sangat dialami sebagian besar pelacur yang ada dilokalisasi. Hal tersebut disebabkan adanya kelas yang berbeda atau adanya

penggolongan-penggolongan sosial di tengah-tengah kehidupan yang semakin kapitalistik dan materialistik. Di dalam teori sosial dikenal dengan adanya teori konflik sebagaimana yang dikatakan Karl Marx bahwa pertentangan antara kaum majikan dengan kaum buruh disebabkan karena kelas yang berbeda.

Hal tersebut sama yang terjadi dalam kehidupan pelacuran. Golongan muncikari (germo) sebagai bos atau majikan dan golongan pelacur sebagai pekerja atau yang dipekerjakan sehingga dari kedua pihak tersebut yang pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Namun jika diambil contoh realita nyata yang terjadi, pihak yang diuntungkan adalah kelas yang paling tinggi. Sebab pelacuran adalah golongan sosial yang senyatanya kurang diuntungkan.

Hasil wawancara dengan Agnes (nama samaran) usia 27 tahun, asal Bondowoso:

"kaule neka saongguna tak koat bede edinnak, polana sering epentak pesse ben bunda padahal kaule la mare majer kos ben keamanan, bereema pole mon tadek bunda engkok tak bisa olle pelanggan" (wawancara, 14 juni 2011)

Artinya:

"Saya ini sesungguhnya tidak kuat/enak tinggal disini, karena sering diminta uang oleh bunda (germo) padahal sudah bayar uang kos dan keamanan. Bagaimana lagi jika tidak ada bunda saya tidak bisa dapat pelanggan".

Selain tekanan di atas, tentunya yang sering adalah tekanan dari pelanggan. Pelanggan sebagai pembeli sangat berkuasa, dengan materi yang dimilikinya mereka juga leluasa untuk mengarpakan apa yang menjadi kemauannya. Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan Nita (nama samaran) umur 31 tahun:

"Kesel aku mas kemarin aku diajak tidur katanya dibayar 2 kali lipat dari biasanya agar saya temani minum dan melayani 3 orang sekaligus, kalo tidak minum saya tidak dibayar. Aku mabuk tidak berdaya terus bangun-bangun kepalaku pusing ternyata mereka udah pada pulang. HP, uang dan perhiasanku dibawah juga. Banyak mas disini yang ditipu padahal udah bayar keamanan masih tetap. Dasar buaya darat maunya masuk di lubang aja tapi tidak mau bayar, dikira lubangnya semut."
(wawancara tanggal 28 juni 2011)

Walau tekanan kultural dan struktural yang selalu dilontarkan kepadanya, hal tersebut tetap diterima oleh pelacur. Masyarakat sah saja mempunyai penafsiran, namun masyarakat juga perlu mengetahui lebih dalam kehidupan pelacur. Siapa pun tidak akan mengingkari bahwa dunia pelacuran adalah bukan pilihan utama di dalam bahtera kehidupan sosial manusia. Bahkan tidak

tidak ada seorangpun yang bercita-cita menjadi pelacur. Harus dipahami bahwa kehidupan sosial di tengah kehidupan yang kapitalistik dan materialistik yang mengantarkan kehidupan mereka menjalani kehidupan kelam.

4.3 Faktor Pendorong Perempuan menjadi PSK

Berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian ini dan kemudian diinterpretasi, perempuan bekerja di Lokalisasi Padang Bulan sebagai PSK, dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Masing-masing faktor pendorong tersebut dapat dirinci lagi menjadi beberapa subfaktor pendorong.

Faktor pendorong wanita menjadi PSK yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu perempuan itu sendiri untuk kemudian memilih profesi sebagai PSK. Faktor internal ini sangat berkaitan dengan kondisi psikologis seorang perempuan yang kemudian terkait dengan kuat atau tidaknya perempuan dalam meyakini dan berpegang teguh pada aturan-aturan normatif.

Faktor psikologis merupakan pendorong kuat yang berasal dari dalam jiwa atau pribadi yang bersangkutan, dengan bermacam cara pembentukan sebagai berikut:

- a. Terjadinya disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, sehingga terjadi guncangan jiwa dan mengalami keputusan;
- b. Terjadinya pengalaman-pengalaman traumatis dan *shocked* mental, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks; dan
- c. Adanya nafsu-nafsu seks abnormal yang tidak disintegrasi dalam kepribadian seperti hiperseks yang tidak pernah merasa puas mengadakan relasi seks

Sebagaimana disinggung di depan, faktor internal ini tidak berdiri sendiri karena pada saat tertentu, misalnya pada saat pengaruh dari luar sangat besar dan kecilnya kondisi iman atau keyakinan pada norma agama dalam diri seorang perempuan, maka akan secara simultan mempengaruhi keputusan seorang perempuan untuk menerjuni profesi sebagai PSK. Seorang perempuan yang memiliki keyakinan yang kuat atau besar dari dalam dirinya dan berpegang teguh pada norma-norma tersebut, serta kemudian takut

menghadapi konsekuensi hukuman atau sanksi jika melanggar norma-norma tersebut, maka seorang perempuan lebih memilih hidup sengsara dari sisi ekonomi dari pada sengsara secara psikologis menanggung beban hidup bermasyarakat karena dicap sebagai PSK, wanita "perusak" rumah tangga orang dan tatanan normatif masyarakat. Oleh karena itu perempuan yang demikian, yang secara internal dari dalam dirinya berpegangteguh pada norma-norma yang berlaku dalam komunitasnya akan menghindari dan bahkan tidak mau dekat-dekat dengan profesi PSK.

Kondisi tersebut akan sangat berbeda jika perempuan secara internal dari dalam dirinya tidak memiliki keyakinan yang sangat kuat dan tidak punya komitmen untuk berpegang teguh pada norma-norma dalam masyarakat, maka perempuan tersebut juga siap menanggung segala resiko dari keputusannya memilih profesi sebagai PSK. Lebih-lebih jika faktor eksternal sangat besar pengaruhnya misalnya iming-iming pendapatan ekonomi yang relatif besar maka wanita yang menjadi PSK, semakin mengabaikan resiko atau dampak negatif dari profesi PSK. Resiko yang siap ditanggung tersebut tidak hanya resiko sosial, yakni dikucilkan dari masyarakat atau komunitasnya, resiko religi

antara lain sebagai penerima dosa besar, tetapi juga resiko kesehatan. Sebagaimana diketahui dari laporan berbagai penelitian misalnya (Rai, 1994) menyebutkan PSK sangat rawan terkena penyakit menular seksual, seperti sipilis, gonoro, dan bahkan HIV/AIDS.

Sehubungan dengan hal tersebut seorang PSK di Lokalisasi Padang Bulan, bernama Icha (23 tahun) asal Kecamatan Gambirano, Kabupaten Jember, mengatakan alasannya mengapa ia tidak takut dengan dosa dan penyakit akibat menjadi PSK:

"Wah...Gimana ya Mas? Sebenarnya takut juga sih. Tapi gak apa-apa wis soale orang tuaku yang janda dan anakku yang baru berumur dua tahun harus aku penuhi kebutuhannya, gak ada lagi yang mau menopang hidup kami setelah saya diceraiakan suami. Biarlah aku tanggung sendiri semua resikonya"

Dari pernyataan Icha tersebut tersirat bahwa karena lemahnya keyakinan dan komitmen dirinya untuk memegang teguh norma-norma yang berlaku pada komunitasnya dan kuatnya dorongan dari luar untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonominya menjadikan Icha mengabaikan risiko negatif menjadi seorang PSK. Status dirinya yang janda sepertinya juga sebagai pendorong penting yang mendorongnya mengambil profesi

sebagai PSK. Memang, dalam keadaan menjadi janda banyak hal mungkin bisa terjadi yang semakin mendorongnya untuk menjadi PSK. Seperti kebutuhan seksual yang semula terpenuhi secara wajar dan teratur menjadi terhenti, godaan laki-laki "hidung belang" yang kemudian menjadi pelanggannya, semakin bebas menggoda akibat suami sudah tidak ada lagi, sampai pada tekanan ekonomi akibat ditinggal suami yang biasanya memberi nafkah. Dalam keadaan seperti itu jika dari dalam diri seorang janda tidak kuat imannya sangat mungkin mereka terjun menjadi PSK.

Faktor kedua yang mendorong perempuan menjadi PSK adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang mendorong perempuan menjadi PSK yaitu semua faktor pendorong yang berasal dari luar diri individu seorang perempuan. Faktor eksternal yang pertama sebagaimana yang telah disinggung adalah faktor ekonomi.

Faktor ekonomi ini sangat erat dengan kemiskinan yang merupakan salah satu faktor yang dominan dalam pembentukan kondisi yang mengarahkan seorang perempuan pada pekerjaan melacur dan dapat pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidup bagi seorang pekerja seks dan keluarga yang dihidupinya.

Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini adalah kurangnya dasar pendidikan yang akan berpengaruh pada pengetahuan dan pengalaman yang kurang pula, sedangkan di sisi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan mereka atau pekerja yang benar-benar mempunyai kemampuan di bidangnya. Kondisi diatas tidak menutup kemungkinan untuk membawa mereka terjun dalam lapangan pekerjaan yang bertentangan dengan norma masyarakat maupun agama serta hati nurani mereka termasuk di dalamnya adalah aktivitas pelacuran.

Jadi, dorongan dari luar dirinya yang sangat kuat berupa kesengsaraan secara ekonomi, melihat anaknya atau anggota keluarganya yang harus dipenuhi kebutuhannya, serta bersamaan dengan itu muncul adanya kasih sayang dan rasa tanggung jawab kepada keluarganya, maka dengan mengabaikan resiko negatif dari profesi PSK akhirnya banyak perempuan memilih menjadi seorang PSK.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Fitri (27 tahun), seorang PSK berkulit putih dan tinggi semampai, berasal dari Probolinggo:

"Saya menjadi seperti ini (menjadi PSK) semata-mata karena cari uang Mas, sulit cari kerja karena mungkin

tingkat pendidikan saya cuma lulus sekolah dasar (SD), sementara keluarga saya sangat miskin dan adik-adik saya empat masih kecil-kecil, apalagi yang bisa saya banggakan sebab pacar saya meninggalkan saya setelah merenggut kegadisan saya. Saya malu jika diam di rumah tanpa aktivitas maka lebih baik begini ini (menjadi PSK). Keluarga saya tidak tahu jika saya seperti ini, jika tahu saya kira akan dilarang.” (hasil wawancara, tanggal 23 juli 2009)

Pernyataan Fitri tersebut semakin memperjelas bahwa faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang mendorong Fitri serta perempuan lainnya terdorong menjadi PSK. Apa yang dialami dan dirasakan oleh Fitri tersebut juga sejalan dengan pendapatnya Saptari dan Holzner (1997) bahwa penyebab banyak wanita menjadi pelacur atau PSK/PSK antara lain karena: 1) hilangnya keperawanan. Dalam ideologi gender kebanyakan masyarakat menilai keperawanan atau kegadisan diterima sebagai ciri perempuan baik-baik, yang masih dianggap sangat penting yang perlu dipertahankan selama ia belum kawin. Jika seseorang diketahui atau dianggap telah kehilangan keperawanannya akibat peristiwa pemerkosaan atau terbujuk oleh seorang laki-laki, maka kemudian akan muncul pandangan bahwa sekali sudah “rusak”, nama baik tidak bisa diperoleh

kembali. Akibatnya tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali masuk kedalam peran yang diciptakan untuk mereka yaitu menjadi seorang pelacur atau PSK.

Pernyataan Fitri tersebut juga menyiratkan adanya faktor selain faktor ekonomi yang mendorongnya menjadi PSK yaitu sulitnya mencari pekerjaan, tingkat pendidikannya yang rendah, karena ditinggalkan pacarnya yang tidak bertanggungjawab. Kemudian dia merasa sulit untuk mendapatkan jodoh atau tidak segera menikah sementara usianya kian bertambah, juga merasa malu mengganggu di rumah. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi bahkan berlaku secara simultan mendorongnya menjadi PSK.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapatnya Rai (1994) bahwa pada umumnya dari segi pendidikan para wanita PSK berpendidikan rendah. Hal ini dapat dipandang bahwa biasanya masyarakat dari golongan ekonomi miskin memiliki kemampuan yang rendah dalam menjangkau pendidikan yang layak, sehingga mereka berpendidikan rendah. Jika para PSK berpendidikan rendah, maka kemungkinan besar mereka berasal dari golongan ekonomi rendah. Dengan demikian ketika mereka bekerja sebagai

PSK merupakan satu cara untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Pada dasarnya disinilah eksistensi PSK itu nampak nyata.

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Fitri tersebut, Ria (30 tahun) mengungkapkan baru satu tahun menjadi PSK. Perempuan yang berasal dari Situbondo serta berkulit hitam manis ini mengungkapkan sebagai berikut:

"Saya sebelumnya tidak pernah berpikir akan menjadi seperti ini Mas (menjadi PSK). Awalnya saya diajak teman saya bernama wati, katanya bekerja di rumah makan di Bali, eh ...ternyata saya diajak seperti ini (menjadi PSK). Tentu saja awalnya saya takut dan menolak tapi temanku terus merayuku, apalagi aku berpikir usiaku udah tua tapi belum dapat jodoh. Aku pingin dapat dapat uang banyak dengan mudah. Akhirnya saya bersedia sampai sekarang. Keluarga saya belum pernah tahu profesiku ini Mas." (hasil wawancara, tanggal 12 juli 2009).

Hal lain juga dipaparkan oleh Tari (23 tahun). Dia harus menghidupi ibunya yang sudah tua dan adiknya yang masih kecil-kecil sedangkan ibunya tidak lagi kuat bekerja sebagai buruh tani, sehingga jalan satu-satunya adalah menjual diri karena bekal keterampilan tidak ia miliki dan ia hanya lulusan sekolah dasar. Dengan demikian ia pulang ke kampungnya untuk memberikan

sebagian hasilnya kepada orang tua dan adiknya (hasil wawancara, tanggal 30 Juli 2009)

Alasan seorang wanita menjadi PSK sebagaimana hasil penelitian ini ternyata bermacam-macam. Ada karena tekanan ekonomi, berstatus janda dengan rentang usia 17-30 tahun serta berpendidikan rendah. Namun tidaklah berarti bahwa setiap wanita yang mengalami keadaan seperti itu pasti akan menjadi PSK, sebab masih ada faktor lain yang mempengaruhi dari dalam diri individu wanita itu sendiri, seperti kuat lemahnya iman, faktor nilai yang dianut, dan faktor lingkungan sosial budaya dan spiritualismenya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada umumnya sekaligus penyebab dominan perempuan menjadi PSK adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu jika memang PSK akan diberantas maka upaya pencegahan terhadap bertambah banyaknya PSK, harus ditujukan kepada perempuan yang rentan mengalami keadaan seperti itu.

Sehingga untuk mencegah semakin banyaknya PSK, antara lain harus dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berpeluang menjadi PSK.

Kelompok rentan tersebut harus diberi akses pekerjaan dan peningkatan keterampilan lain yang layak untuk bekal hidup mereka.

Dengan demikian, pembinaan melalui kursus, pelatihan, penyuluhan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi para PSK sangat penting. Pendekatan sosial, kultur dan spiritual juga perlu dilakukan jika semua pihak ingin agar mereka meninggalkan profesinya sebagai PSK. Bahkan upaya serupa perlu juga dilakukan terhadap para laki-laki "hidung belang" sebagai pelanggan para PSK. Diharapkan para laki-laki "hidung belang" juga memiliki kesadaran untuk tidak lagi memanfaatkan jasa para PSK untuk memenuhi dan memuaskan hasrat seksual mereka.

4.4 Peran PSK di Bidang Ekonomi bagi Keluarganya

Pembahasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa pada umumnya para perempuan menjadi PSK karena terdorong oleh faktor ekonomi. Icha, Tari dan Fitri sebagai PSK penghuni Lokalisasi Padang Bulan telah mengakui hal itu. Dorongan menjadi PSK karena faktor ekonomi sebenarnya diungkapkan semua PSK yang menghuni Lokalisasi

Padang Bulan. Tidak ada satupun PSK yang secara terbuka bersedia mengakui bahwa menjadi PSK karena dorongan seksual, namun secara tersirat ada yang kondisinya menjadi PSK setelah direnggut kegadisannya oleh pacar dan kemudian ditinggalkan pacar, ada pula yang karena statusnya janda, ada indikasi faktor pemenuhan kebutuhan seksual juga menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih menjadi PSK. Namun sekali lagi faktor ekonomi atau upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi adalah yang paling dominan menjadi pendorong wanita menjadi PSK.

Seperti yang dipaparkan oleh Ica pada 2 juni 2009 bahwa:

"Sekarang keadaannya sepi mas, sehari baru dapat satu, bukannya saya marah mas tapi saya tidak senang basa-basi. Aku orangnya satu ya satu karena aku di lokalisasi ini niat cari kerja untu menafkahi anak dan orang tua yang sudah janda. Mas mau gratisan ya?... Maaf ya mas, ini bukan milik negara kencing aja bayar mintanya malah gratisan. Ini kalau mau gratisan, tapi kalau mau sama kuda"

Berdasarkan pengakuan para PSK, walaupun tidak semua PSK beruntung dengan profesinya tersebut tetapi ada PSK yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya bahkan ada yang mengaku bisa membangun rumah

yang bagus di kampung halaman atau daerah asalnya. Bisa menyekolahkan anak dan adiknya sampai perguruan tinggi. Pada umumnya pihak keluarga dan tetangga para PSK di kampung halamannya tidak mengetahui bahwa profesinya PSK. Oleh karena itu dengan kondisi ekonomi yang semakin baik dan jasanya bagi keluarga maka ada peningkatan status sosial di masyarakat. Bahkan tidak jarang para PSK mendapatkan penghargaan berupa pujian karena jasanya dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Dengan demikian bagi keluarga mereka yang kurang mampu dan tidak memiliki sumber ekonomi lainnya maka besar sekali peran ekonomi dari PSK bagi keluarganya. Ada lima orang PSK bahkan mengakui bahwa pihak ayah dan ibunya dan beberapa keluarganya mengetahui bahwa profesinya sebagai PSK. Tetapi ternyata dia tetap mendapatkan restu dan ijin untuk meneruskan profesi sebagai PSK karena kebutuhan ekonomi, menjadi tulang punggung keluarga satu-satunya. Hal ini seperti yang diungkapkan Tini (28 tahun) dan sudah sepuluh tahun menjadi PSK dengan berpindah-pindah lokalisasi:

"Saya awalnya menjadi PSK karena sulitnya mencari kerjaan Mas. Keluarga saya paling miskin di kampung

dan tetangga kaya-kaya karena itu saya malu dengan kondisi keluarga. Awalnya keluarga tidak tahu saya menjadi PSK dan saya terus bertekat menyejahterakan keluarga. Lama kelamaan keluarga mengetahui juga. Namun karena sudah terlanjur dan peran saya di bidang ekonomi sangat besar, kemudian saya telah membuktikan keberhasilan saya maka keluarga tidak melarang saya jadi PSK. Semoga suatu ketika masih ada laki-laki yang bersedia menikah dengan saya Mas, kemudian saya berhenti menjadi PSK."

Pengakuan Tini tersebut telah menunjukkan bahwa bagi keluarga tertentu betapa besarnya peran PSK pada peningkatan ekonomi keluarganya. Hal yang menarik dari pengakuan Tini adalah masih ada sisa-sisa harapan agar kelak ada laki-laki yang bersedia menikahinya dan setelah menikah dia berhenti menjadi PSK. Pernyataan Tini tersebut mewakili pikiran beberapa PSK lainnya yang menyiratkan bahwa dia tidak ingin menjalani hidupnya menjadi PSK sepanjang hidupnya. Dia masih ingin menikah dan berhenti menjadi PSK betapapun menjadi PSK bisa menopang ekonomi keluarga. Berdasarkan informasi dari ketua RT, Padang Bulan memang memiliki lebih dari 600 mantan PSK yang akhirnya menemukan jodohnya dan berhenti menjadi PSK. Oleh karena itu Tini dan beberapa PSK yang memiliki harapan sama dengan Tini masih memiliki

peluang untuk mendapat jodoh dan menikah dengan bercermin dari pendahulunya yang sudah mendapat jodoh.

Temuan hasil penelitian bahwa peran PSK sangat besar bagi peningkatan ekonomi keluarganya karena penghasilannya tersebut sejalan dengan pendapatnya Kusnadi. Menurut Kusnadi, dkk (2006:10), keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi hidup rumah tangganya, meningkatkan kapasitas diri, dan status sosial dalam struktur sosial masyarakatnya, tetapi juga memberi kontribusi terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat lokal. Dalam hal ini perempuan tidak hanya menjadi potensi sosial budaya, tetapi juga sebagai potensi ekonomi yang patut dipertimbangkan.

Hanya saja persoalannya tidak semua keluarga bahkan masyarakat mau menerima eksistensi PSK. Profesi sebagai PSK sampai saat ini masih dianggap profesi yang tabu, memalukan, rendah dan dianggap bergelimang lumpur dosa. Tentu saja penilaian itu wajar mana kala standar penilaiannya didasarkan pada norma-norma agama dan pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun berdasarkan fakta historis profesi PSK itu ada sejak masyarakat terbentuk, bahkan

indikasinya ada sejak zaman nirleka dengan pola serta model yang berbeda-beda. Seiring munculnya fenomena PSK sejalan itu pula pelarangan terhadap PSK itu ada. PSK dari dulu sampai sekarang dianggap jelek dan merusak keutuhan rumah tangga.

Lepas dari adanya pro dan kontra terhadap eksistensi PSK, faktanya dengan menjadi PSK perempuan tersebut memiliki pendapatan ekonomi sehingga PSK menganggapnya sebagai pekerjaan. PSK berupaya melakukan yang terbaik bagi diri sendiri dan keluarganya dari sekian banyak pilihan yang ada. Pekerjaannya sebagai PSK dianggap memberi kontribusi positif bagi keluarganya. Sejalan dengan pendapatnya Friedl (1987:165), bahwa perempuan yang bekerja dan memiliki posisi ekonomi menjadi faktor yang menentukan dalam berhubungan dengan laki-laki, baik dalam aktivitas maupun dalam masyarakat. Seiring dengan berkembangnya ekonomi internal rumah tangga yang semakin baik dan peningkatan status sosial di masyarakat, kemampuan perempuan dengan mudah mengontrol sumber daya ekonomi dalam rumah tangga. Dengan perkataan lain keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dapat

memberi perubahan besar kedudukan sosial di rumah tangga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada dua orang PSK mengaku memiliki suami. Satu PSK mengaku suaminya ada di rumah tapi sakit-sakitan sehingga tidak mampu bekerja. Seorang PSK lainnya mengaku suaminya pergi ke luar negeri sebagai TKI, namun sudah dua tahun tidak pulang dan tidak pernah berkirim kabar. Oleh karena itu PSK tersebut mengambil posisi mencari nafkah dengan menjadi PSK. Hal tersebut dilakukan karena perempuan itu semata-mata ingin memiliki peranan positif bagi keluarganya. Menurut Sanday (1974:190) peranan domestik perempuan adalah peranan sosial yang terkait dengan aktivitas internal rumah tangga seperti memasak, mengurus anak dan melayani suami termasuk pemenuhan kebutuhan biologis suami. Sedangkan peranan publik adalah peranan sosial yang berketerkaitan dengan aktivitas sosial, ekonomi dan politik di luar rumah tangga. Jika dua hal peranan tersebut dapat dilakukan oleh seorang perempuan maka ia memainkan peranan ganda.

Pada umumnya motivasi perempuan untuk bekerja di ranah publik didasari oleh kepentingan di rumah tangga, mendapatkan kemandirian

ekonomi, belajar menghadapi tantangan sosial, ekonomi dan untuk meningkatkan status sosialnya. Menurut Stoler (1984:184), kebebasan ekonomi seorang perempuan bukanlah fungsi dari ia bekerja, namun ia mendapatkan penghasilan yang teratur yang dapat diandalkan. Bagi rumah tangga miskin, penghasilan seseorang perempuan dari usaha ekonomi memberinya kesempatan yang lebih penting dalam ekonomi rumah tangga. Sebaliknya, bagi rumah tangga yang lebih kaya, penghasilan seorang perempuan memberinya dasar material untuk kekuasaan sosial

4.5 Persepsi Masyarakat terhadap PSK di Lokalisasi Padang Bulan

Sampai saat ini masih menjadi polemic di masyarakat menyangkut persepsi mereka terhadap PSK di lokalisasi Padang Bulan. Seperti yang diungkapkan oleh Prayitno Hadi (1990:34) bahwa prostitusi yang berada dalam lokalisasi membawa sikap, reaksi dan dampak bagi masyarakat sekitarnya. Sikap reaktif masyarakat luas atau reaksi bergantung pada 4 faktor yaitu:

1. Derajat penampakan atau fasibilitas tingkah laku yaitu menyolok tidaknya perilaku imoril para PSK;

2. Besar pengaruhnya yang mendomisalir lingkungan sekitarnya;

3. Kronis tidaknya kompleks tersebut, menjadi sumber penyakit kotor seperti sipilis dan GO serta penyebab terjadinya abortus dan kematian bayi-bayi; dan

4. Pola kultural: adat-istiadat, norma-norma susila dan agama yang menentang pelacuran yang sifatnya represif dan memaksakan.

Masyarakat yang kontra terhadap keberadaan lokalisasi dalam bentuk reaksi sosial dalam diri masyarakat. Reaksi sosial ini bersifat menolak sama sekali dan mengutuk keras serta memerlukan hukuman berat, sampai pada sikap netral, masa bodoh dan acuh tak acuh serta menerima dengan baik. Masyarakat yang menolak dengan keberadaan lokalisasi beserta PSK, memberikan reaksi dengan sikap benci, jijik, marah dan mengutuk PSK sebagai penghuni neraka jahanam. Sebab masyarakat yang kontra menilai keberadaan lokalisasi hanya membawa dampak negatif bagi lingkungan serta merusak sistem norma yang sudah ada.

Pertimbangan masyarakat sekitar menolak kehadiran PSK tidak lain mengacu pada pranata

atau norma agama seperti yang diungkapkan oleh Kholil, Munawar (1991: 57), bahwa , norma agama tidak memperbolehkan wanita untuk berbuat zina dan berganti-ganti orang dan wanita merupakan harapan pria untuk menjadi seorang istri yang soleh. Akan tetapi walaupun secara agama bertentangan, namun kenyataannya masyarakat tidak mungkin menentang dengan adanya kebijakan pemerintah daerah, sehingga lama-kelamaan unsur lokalisasi mulai diterima walaupun dengan perasaan dan kerelaan yang memaksa. Dengan jaminan akan adanya bimbingan, penyuluhan dan pendidikan terhadap para PSK serta muncikari memberi harapan untuk memudahkan melakukan pengawasan. Sehingga lambat laun, kelompok masyarakat yang kontra akhirnya menerima keberadaan lokalisasi tersebut.

Akan tetapi bagi kelompok masyarakat yang pro terhadap keberadaan lokalisasi ini, tidak lain karena mereka diuntungkan. Keberadaan lokalisasi telah memunculkan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat seperti pedagang, tukang becak, tukang ojek, pembantu atau tukang cuci pakaian, tukang pijat, dan penjual jamu. Sehingga sebagian masyarakat terutama yang mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan PSK tersebut

memiliki persepsi positif terhadap PSK di lokalisasi.

Manfaat ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, misalnya, para pedagang yang biasanya mendirikan usaha warung makan dan minum yang berada di luar maupun di dalam kompleks lokalisasi. Biasanya yang ada di dalam lokalisasi banyak dimiliki oleh muncikari sedangkan yang diluar dimiliki oleh warga sekitar. Pembeli warung makanan di luar lokalisasi kebanyakan adalah tukang becak, tukang ojek dan lain-lain. Biasanya para pedagang dan tukang-tukang tersebut banyak memilih dan membeli di luar lokalisasi karena harga di luar lebih murah dan bersih.

Seorang pencuci pakaian mempunyai langganan di wisma-wisma tertentu. Kebanyakan penghuni wisma mencuci pakaiannya ke orang lain, sehingga sebagian warga ada yang membuka usaha laundry atau pencucian baju. Pemerintah desa setempat juga mendapatkan dana kas dari pengelolaan lokalisasi, misalnya pembagian dari uang parkir dan tiket masuk. Anggota masyarakat dari kelompok ini menilai PSK di lokalisasi tidak berdampak buruk asal dikelola dengan baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Frengki (usia

45 tahun) yang rumahnya berada di 200 meter
Lokalisasi Padang Bulan:

"Sebenarnya menurut saya sebagai warga masyarakat sini, keberadaan lokalisasi tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat sini, sebab lokasinya relatif tersembunyi, dan secara ekonomi memberikan banyak peluang kerja. Ada yang menjadi tukang parkir, ada yang menjadi pembantu rumah tangga di wisma lokalisasi, ada yang tukang cuci, bagian keamanan, penjaga tiket masuk, dan warung-warung sembako, atau warung makanan-minuman. Oleh karena itu saya sangat tidak setuju jika lokalisasi harus ditutup." (hasil wawancara, 16 Juni 2009).

Pendapat Frengky tersebut senada dengan penuturan Bapak Joni, warga di luar lokalisasi:

"Mas, masyarakat sekitar sini pada umumnya tidak mempersoalkan keberadaan lokalisasi itu. Yang sering memperlmasalahkan Lokalisasi Padang Bulan mungkin, ya, masyarakat yang jauh dari lokalisasi."

Memang masyarakat pada umumnya menganggap PSK sebagai sumber penyakit sosial dan medis yang tumbuh di masyarakat. Gaya hidup pengguna jasa lokalisasi PSK maupun pelanggannya yang cenderung suka gonta-ganti pasangan, hidup bebas, minum-minuman keras, tidak peduli suami orang atau bukan, hingga dianggap penghancur rumah tangga. Pada kenyatannya jika dilihat secara jeli kondisinya adalah sebaliknya. Faktor yang lebih berbahaya

sebagai penyebar penyakit adalah pihak pelanggan pengunjung daerah-daerah prostitusi (Krisna, 1979:148).

Anggota masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat apapun dari keberadaan lokalisasi jelas memiliki persepsi negatif. Persepsi negatif itu terutama dari masyarakat yang keberadaanya jauh di luar lokalisasi. Anggota masyarakat dari kelompok ini merasa takut anggota keluarganya terpengaruh dan ikut hanyut dalam kehidupan dan gaya hidup lokalisasi. Mereka takut keluarganya hancur karena lokalisasi PSK menawarkan berbagai kesenangan yang dengan bebas bisa dinikmati asal memiliki uang yang cukup. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, diketahui bahwa pengunjung lokalisasi cukup beragam. Mereka terdiri dari usia remaja atau muda, lajang, usia tua maupun yang telah beristri. Setiap harinya tidak kurang dari seratus orang datang dan pergi untuk menikmati keberadaan lokalisasi PSK. Ada yang sekedar mengantar teman, jalan-jalan dan melihat-lihat wanita cantik dan sampai yang membeli. Oleh karena itu ketakutan masyarakat yang tidak suka dengan keberadaan lokalisasi PSK cukup beralasan. Mereka takut ada anggota keluarganya menjadi salah satu

pengunjung sebab dari sisi normatif terutama norma agama sangat menentang perzinahan.

Menurut Soedjono (1974: 117) jika dibiarkan tanpa dicegah dan ditanggulangi maka lambat laun dapat dipandang masyarakat sebagai hal yang normal dan wajar. Hal ini mungkin sebabnya sampai saat ini masyarakat sekitar lokasi PSK di Padang Bulan tidak menentang keberadaan lokasi. Mereka mulai terbiasa dan mulai memandang wajar mencari uang dengan usaha yang terkait dengan lokasi. Mereka sudah tidak malu lagi mencari uang yang terkait dengan usaha perzinahan.

Terkait dengan hal ini mestinya pemerintah harus terus menerus berupaya menanggulangi, sedangkan kalau masih ada, itu dianggap sebagai penyakit yang harus tetap diupayakan penyembuhannya. Perlu dicegah dan dihalangi timbulnya dengan meniadakan faktor-faktor penyebabnya. Berupaya melakukan pendekatan *multidisipliner*, misalnya pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Siregar (1982) pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan satu pihak, yaitu PSK, sedangkan pihak lain tidak memperoleh tuduhan apapun,

dengan demikian hal itu tetap menunjukkan bahwa masyarakat tak bisa menerima kehadiran PSK.

Paparan di atas menunjukkan bahwa pandangan masyarakat pada umumnya kepada para PSK masih cenderung negatif dan bersifat menghakimi bahwa apa yang dilakukan oleh para PSK itu adalah salah dan juga ada sebagian yang menyatakan diuntungkan atau berdampak positif. Hal ini dikarenakan adanya akibat yang secara langsung atau tidak langsung dengan adanya lokalisasi.

4.6 Bentuk Pembelaan PSK terhadap Penilaian Masyarakat

Seburuk apapun penilaian masyarakat pada umumnya terhadap para PSK, mereka juga tetap manusia yang masih punya rasa malu, punya keinginan untuk dihargai oleh manusia yang lainnya. Para PSK tersebut tetap saja memiliki hak-hak dasar atau hak asasi yang harus dibela dalam banyak hal. Terutama mana kala dia dilecehkan, teraniaya, dan jika hak-haknya ditindas oleh orang lain maka pemerintah ikut bertanggung dengan nasib mereka yang sampai sekarang dipandang

sebelah mata. Mestinya segala bentuk eksploitasi terhadap mereka harus dihentikan.

Keinginan PSK untuk tetap dihargai seperti diungkapkan Tia (27 tahun):

“Mas, walaupun saya seperti ini (sebagai PSK) masih punya harga diri, saya sakit hati juga kalau ada laki-laki melecehkan saya dan berbuat seenaknya pada saya. Apalagi jika ada yang menghina saya. Perasaan ini pedih rasanya. Andai saja saya punya pilihan lain yang lebih baik dan saya mampu melakukan tentu saja saya berhenti jadi PSK. Sungguh mas,saya betul-betul terpaksa, walaupun saya tampak tersenyum, tertawa-bersama pelanggan, sungguh di dalam relung hati saya yang paling dalam merasa sedih. Tapi mau bagaimana lagi.....semua sudah terlanjur, saya masih belum bisa berhenti.”

Jadi seburuk-buruknya seorang pelacur, di dalam hatinya tetap ingin dihargai oleh orang lain. Pada umumnya mereka terpaksa menjalani profesi sebagai PSK tersebut. Tia yang pernah sekolah sampai bangku SMA, tetapi tidak sampai lulus tersebut juga mengatakan:

“Mas, coba pikir! .Apakah orang-orang yang mencela kami (para pelacur) itu benar-benar orang bersih, orang suci? Apakah mereka tidak pernah berbuat dosa sedikitpun sehingga mencela kami, menghina kami? Saya yakin orang-orang yang mencela saya juga pernah berbuat dosa, hanya saja mereka pintar menutupi. Lalu apakah kami tidak pernah berbuat baik? Kami juga sering berbuat baik, Mas. Saya juga sering amal, untuk

pembangunan masjid, pada orang yang lebih miskin dari saya. Saya juga ikut pengajian satu Minggu satu kali. Saya merasa lebih baik daripada seorang pejabat yang korupsi, dari seorang kiai haji yang melakukan pelecehan seksual pada santrinya"

Dalam posisinya yang kurang menguntungkan, lebih-lebih menjadi PSK, perempuan tetap menjadi bagian integral yang tidak dapat disembunyikan dari tatanan sosial. Eksistensi PSK tetap harus diperhatikan karena memberi warna sosio-kultural. Dalam praktek, PSK dicari dan menjadi objek sasaran dari kaum pria hidung belang untuk memenuhi hasratnya.

Adanya penghinaan, penilaian buruk dari masyarakat sesungguhnya tidak diterima dengan ikhlas oleh para PSK tersebut. Mereka berupaya dengan segenap kemampuannya melakukan pembelaan diri agar persepsi atau penilaian masyarakat pada umumnya yang buruk tidak lebih buruk lagi. Bahkan para PSK sesungguhnya berupaya agar eksistensinya diakui dan diterima oleh masyarakat sekitarnya serta masyarakat pada umumnya.

Bentuk pembelaan PSK terhadap penilaian masyarakat yang cenderung negatif sebagaimana yang telah disinggung di depan adalah bermacam-

macam. Titin (30 tahun), misalnya, seorang PSK dari Probolinggo, mengatakan:

"Mas, kalau saya dihina langsung di depan saya jelas saya membela dan tidak terima. Saya akan bilang bahwa saya seperti ini terpaksa, saya juga tetap berbuat baik, beramal, dan saya juga menabung agar saya tidak selamanya seperti ini. Karena jika saya sudah tua nanti apa masih laku? Nah, jika saya gak laku lagi pasti berhenti dengan sendirinya, karena itu saya harus punya tabungan. Kalau saya kaya nanti pasti orang tidak terlalu merendahkan saya."

Jawaban dari Titin tersebut senada juga dengan jawaban teman-teman seprofesinya. Seperti yang disampaikan Kristin (30 tahun), PSK asal Jember yang sebelumnya pernah mangkal di Lokalisasi Dolly Surabaya:

"Betul, saya juga menabung Mas. Walaupun saya seperti ini (menjadi PSK), saya juga ikut pengajian satu minggu sekali yang diadakan di lokalisasi ini. Dengan demikian saya masih berharap agar masyarakat tidak terlalu buruk memberikan penilaian pada kami. Mungkin masyarakat gak percaya, tapi ada PSK yang Juara MTQ tingkat Provinsi tahun 1995, kalau tidak salah namanya Mbak Ika Fatmawati. Tetapi pada tahun 2006 ia sudah menikah karena dapat jodoh." (hasil wawancara, 2 Agustus 2009).

Jadi walaupun sebagai PSK mereka juga tetap menjalankan ritual keagamaan sesuai dengan agama yang mereka peluk. Salah satu tujuannya selain ibadah adalah untuk membela dirinya dari

penilaian buruk masyarakat, walaupun mungkin tetap saja masyarakat memberi label negatif. Selain itu, sebagaimana telah disinggung bahwa PSK juga bersedia memberi sumbangan untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan masjid. Tidak sedikit para PSK ketika dia pulang kampung berperan aktif dalam kegiatan ritual keagamaan. Mereka berbusana sopan dan bagi yang muslim mereka memakai jilbab.

BAB V

PENUTUP

Keberadaan PSK di Lokalisasi Padang Bulan secara terbuka dan eksis diketahui masyarakat sejak tahun 1970-an. Lokalisasi tersebut dirintis tahun 1984 serta mulai dibangun serta dihuni 1994. Umur para PSK sebagian besar adalah 17-35 tahun. Lama menjalani profesi sebagai PSK berkisar 1 bulan - 1 tahun. Para PSK sebagian besar berstatus Janda dan pendidikannya sebagian besar setingkat SD.

Alasan dominan sebagian besar perempuan menjadi PSK di Padang Bulan adalah karena didorong oleh tekanan ekonomi, kemudian didukung juga oleh keadaan sulitnya mendapatkan pekerjaan di sektor lain sebagai akibat rendahnya pendidikan mereka. Adanya pengaruh teman, dihianati pacar, dan berstatus janda juga semakin mendorong mereka menjadi PSK. Pekerjaan PSK dengan hasil yang menggiurkan dan lemahnya keyakinan pada agamanya menjadikan mereka mengabaikan segala resiko menjadi PSK, dan pada

akhirnya profesi sebagai PSK saat ini dianggapnya pilihan yang terbaik.

Berdasarkan pengakuan para PSK, walaupun tidak semua PSK beruntung dengan profesinya tersebut tetapi ada PSK yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya bahkan ada yang mengaku bisa membangun rumah yang bagus di kampung halaman atau daerah asalnya. Bisa menyekolahkan anak dan adiknya sampai perguruan tinggi. Pada umumnya pihak keluarga dan tetangga para PSK di kampung halamannya tidak mengetahui bahwa profesinya PSK, oleh karena itu dengan kondisi ekonomi yang semakin baik dan jasanya bagi keluarga, maka ada peningkatan status sosial di masyarakat. Bahkan tidak jarang para PSK mendapatkan penghargaan berupa pujian karena jasanya dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan demikian bagi keluarga mereka yang kurang mampu dan tidak memiliki sumber ekonomi lainnya, maka peran ekonomi PSK bagi keluarganya sangat besar.

Persepsi Masyarakat di lingkungan terdekat lokalisasi dengan radius kira-kira 500 meter dari lokalisasi pada umumnya relatif baik, ditandai dengan toleransi mereka dan tidak adanya keinginan untuk membubarkan lokalisasi tersebut

karena dianggap memberikan keuntungan ekonomi. Masyarakat yang tinggalnya relatif jauh dari lokalisasi, terutama dari kalangan yang taat dan fanatik beragama, memiliki persepsi negative. Sebab PSK dianggap tidak sesuai dengan tuntutan agama dan norma masyarakat.

Bentuk pembelaan para PSK terhadap persepsi negatif masyarakat adalah dengan cara menunjukkan pada masyarakat bahwa ada sisi – sisi positif yang dimiliki PSK walaupun masih saja tetap ada yang menilai negatif. Sisi positif tersebut antara lain ketika PSK tidak sedang berada di lokalisasi, maka ia berperilaku dan berbusana sopan. Menyisihkan sebagian penghasilannya untuk amal dan tetap menjalankan ritual agama yang mereka peluk.

Beberapa saran yang dapat dikemukakan, antara lain sebagai berikut: Pertama, karakteristik dominan para PSK adalah berstatus janda, berpendidikan rendah, dan mengalami tekanan ekonomi. Oleh karena itu disarankan agar upaya pencegahan terhadap semakin bertambah banyaknya PSK diarahkan kepada perempuan yang memiliki karakteristik seperti itu.

Kedua, pengetahuan PSK terhadap resiko terhadap kesehatan, misalnya rentan terkena penyakit menular seksual relatif rendah. Pengetahuan tersebut sangat berkaitan dengan perilakunya untuk mencegah agar tidak tertular penyakit tersebut. Oleh karena itu disarankan kepada pihak terkait untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan atau penyebaran informasi dan pembinaan kesehatan secara intensif, langsung maupun tidak langsung melalui media masa elektronik ataupun cetak kepada para PSK khususnya tentang pencegahan penyakit menular seksual.

Ketiga kepada pemerintah dan masyarakat umum disarankan agar tidak semata-mata menghujat tanpa memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan PSK. Disarankan untuk mengupayakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendidikan baik formal maupun informal, kursus-kursus, pelatihan-pelatihan interpreneur atau kewirausahaan, dan melakukan pembinaan keagamaan, pembinaan perkawinan dalam upaya mencegah semakin banyaknya PSK.

--end--

DAFTAR PUSTAKA

1. Andrianto, Petrus.1994. AIDS dan Penyakit Kelamin lainnya. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran – EGC.
2. Arikunto, Suharsini. 1998. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
3. Asmosiono, Karseno. 1974. Dilarangkah Pelacuran di Indonesia. Majalah sangkakala no 14.
4. As, Alam. 1984. Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia. Bandung:Alumni.
5. Azwar, Syaifudin. 1992. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Liberty.
6. Berita Kedokteran. Penyakit Akibat Hubungan Seksual: Simposium Departemen Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, Berita Kedokteran Indonesia, vol 1 jan – peb 1987.
7. Cholil , M. 1990. Simposium Penyakit Menular Seksual, Harian Pagi Surya, 20 Nopember 1990, Surabaya 1990
8. Departemen Kesehatan. R.I. 1986. Penyakit Hubungan Seksual Dalam Gambar, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
9. _____,1990. Pencegahan AIDS. Petunjuk Untuk Kalangan Khusus, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
10. Green, Lawrence. W.,Marshal W, Freuter, Sigrit G. Deeds and Kay B. Patridge, Health Education Planing Adianestic Approach, Palo Alto,California: Mayfield Publishing Company

11. Jawa Pos. AIDS, Seleksi Alam Ataukah Pertanda Zaman?, Berita Jawa Pos, Minggu 1 Desember 1991
12. Kabulrachman.1987. Beberapa Aspek STD (Sexuality Transmitted Diseas).Majalah Cermin Dunia Kedokteran No.8
13. Kartono, Kartini.1983. Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru, Jakarta: Rajawali.
14. Kholili, Munawar.1991. nilai wanita. Solo: Romadhan.
15. Kinsey, Alfred C. 1963. Sexual Behavior in The Human Male, W.B Sounders Co: Philadelphia and London
16. Krina, Yuyu An.1979. Menyusuri Remang-Remang. Jakarta: PT Sinar Harapan.
17. Kontjaraningrat, 1994. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
18. Kompas.1991.cBencana Mengintip dari "Surga", Berita Kompas, Sabtu 1 Desember 1991.
19. Kompas.1991. b Pelanggan PSK Enggan Pakai Kondom, Berita Kompas, 30 Nopember 1991.
20. Kompas,1991.c :Yang perlu Anda ketahui tentang AIDS", Berita Kompas, Minggu, 1 Desember 1991.
21. Landau, Elaine. 1986. Sexual Transmitted Deseas, Inc enslow Publishers: USA .
22. Majalah Kedokteran Indonesia.Vol.39, Nomor 3 Maret 1989.
23. Mantra, I.B. 1983. Perilaku Sehubungan dengan Kesehatan, Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
24. Mar'at.1981. Sikap Manusia Perubahan Aerta Pengukurannya, Bandung Ghalia Indonesia.

25. Miskawi. 2007. tradisi nyadar sebagai objek wisata budaya. Jember : Unej.
26. Moore, H.L. 1988. Feminism and and Anthropologi. Dales Brewery: Polity Press. P. 14-97.
27. Notoadmodjo, Soekidjo & SolitaSarwono.1985. Pengantar Ilmu Perilaku Kesehatan, Jakarta: BPKM—FKM Universitas Indonesia.
28. Nasikun, 1990.” Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan: Terori dan Implikasi Kebijakan” , dalam Populasi No. 1 Thn 1990. Halaman: 1-12.
29. Purwanto, Didik. 1998. Pasang Perangkap ABCD dan M. dalam Koran Pak Oles, Halaman 10. Denpasar: Koran Pak Oles.
30. Purnomo,Tjahjo & Siregar, Ashadi.1985. Dolly—Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly, Jakarta: Grafitipers.
31. Pramedina, Ester.1990. Perilaku Wanita Tuna Susila Terhadap Pencegahan Penyakit Menular Seksual, Skripsi IKM Unair Surabaya.
32. Prajidno, Hadi. 1990. Respon Sekitar Masyarakat Lokalisasi Terhadap Kebijakan Pemindahan Lokalisasi Ke Kecamatan Puger Dati II Jember. Jember: UNEJ.
33. Prakuso Bambang.1989. Kasus Kejahatan Seks (Hukum atau Keadilan) Jakarta: Penerbit Antar Kota.
34. R. Soesilo. 1989. Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Bogor: Liberti.
35. Rai, I Wayan. 1994. “Perilaku Wanita Tuna Susila terhadap Pencegahan Penyakit Menular Seksual di Kabupaten Buleleng”, dalam Aneka Widya. No. 1 Thn XXVII Januari 1994 Halaman 102-113. Singaraja: STKIP.

36. S. Margana. 1994. Prostitusi di Hindia Belanda. Jakarta: Balai Pustaka.
37. Sjubandono.1981. "Pelaksanaan Usaha Penanggulangan dan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Jawa Tengah", Semarang, Simposium, Penyakit-Penyakit Yang Ditukarkan Melalui Hubungan Kelamin.
38. Soedjono, D.1977. Pelacuran ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat, Bandung: PT Karya Nusantara.
39. Soewarso, Titi Indijati.1988. Simposium Perkembangan Terakhir Penanggulangan Syphilis dan Frambusia, Jakarta Depkes RI.
40. Sulistyaningsih, Endang.dkk. 1997. Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Sinar Harapan.
41. Ulman, Haris. 1983. Reading in Urban Geograpy, dalam Rahardjo : Perkembangan Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Pt. Bhina Aksara.
42. Utomo,Budi.1993. Penyakit Kelamin Yang Perlu Anda Ketahui. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Biografi Penulis



Miskawi lahir di Sumenep 10 Mei 1985. Ia menyelesaikan Sarjana Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Jember. Kemudian melanjutkan pascasarjana di jurusan yang sama di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selama kuliah banyak menghabiskan sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Aktivasnya saat ini sebagai dosen Pendidikan Sejarah dan menjabat sebagai Wakil Dekan I FKIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Organisasi yang ditekuninya antara lain sebagai pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Komisariat Banyuwangi, Pembina Teater Bhineka 45, Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, dan Pembina Teater Bhineka 45, Pergerakan Kebangsaan, dan Forum Kebangsaan. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan antara lain: Spritualisme dan Religuisitas di Kalangan Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Peziarah Di Makam Keramat Syeh Datuk Ibrahim Di Kabupaten Banyuwangi, 2010; Dinamika Sosial Ekonomi Petani Garam di Desa Pademawu Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan 1977-1988; Tradisi Nyadar Sebagai Wisata Budaya di Kabupaten Sumenep, 2007; Kesenian Tradisional Gandrung Banyuwangi (studi tentang nilai-nilai budaya dalam muatan lokal) 2012; serta Budaya Korupsi masyarakat Indonesia, Gerakan dan Marginalisasi Perempuan, Pelacuran VS Koruptor.

Penulis bisa dihubungi melalui email: miskawihistory@yahoo.co.id